



LAPORAN PELAKSANAAN KEGIATAN PENGADILAN NEGERI BATURAJA KELAS IB TAHUN 2023



KATA PENGANTAR



Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT. Berkat rahmat dan karunianya kami dapat menyusun laporan tahunan ini. Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 kami buat sebagai bentuk pertanggung jawaban kami selaku Ketua Pengadilan Negeri Baturaja yang meliputi tugas peradilan dan segala kegiatan rutin maupun pembiayaan di Pengadilan Negeri Baturaja. Selain itu kami laporkan juga program kerja yang telah kami susun bersama-sama Ketua Pengadilan Negeri, Wakil Ketua Pengadilan Negeri, Hakim dan Panitera dan Sekretaris Pengadilan Negeri Baturaja untuk Tahun Anggaran 2023.

Sebagai lembaga Pemerintah, Pengadilan Negeri Baturaja merupakan Pengadilan Tingkat Pertama dibawah kekuasaan Mahkamah Agung dan hal ini juga merupakan tanggung jawab untuk melaksanakan tugas dan fungsi yang diamanatkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Kewajiban tersebut dijabarkan dengan menyiapkan, menyusun dan menyampaikan laporan kinerja secara tertulis, periodik dan melembaga. Laporan ini dimaksudkan untuk mengkonsumsikan capaian kinerja Pengadilan Negeri Baturaja dalam satu tahun anggaran yang dikaitkan dengan proses pencapaian tujuan dan sasaran serta menjelaskan keberhasilan dan kegagalan tingkat kinerja yang dicapainya.

Dengan Tersusunnya Laporan Pelaksanaan Kegiatan Pengadilan Negeri Baturaja ini, semoga dapat menjadi tolak ukur bagi pencapaian dan Peningkatan Kinerja Pengadilan Negeri Baturaja selama Tahun 2023. Besar harapan kami, agar laporan ini dapat diterima dengan baik dan selanjutnya permohonan kami atas segala petunjuk dan saran untuk perbaikan pelaksanaan tugas-tugas mendatang.

Baturaja, 12 Januari 2024

KETUA,

ELVIN ADRIAN, S.H., M.H.
NIP. 197901112002121004

DAFTAR ISI

PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN	4
BAB II A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM	
- Keadaan Perkara Tingkat Pertama	8
- Keadaan Perkara Tingkat Banding	8
- Keadaan Perkara Tingkat Kasasi	8
- Keadaan Perkara Tingkat Peninjauan Kembali	8
B. PENYELESAIAN PERKARA	
- Jumlah Sisa Perkara yang Diputus	9
- Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu	9
- Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK	10
- Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil melalui Mediasi	10
- Jumlah Perkara Anak yang Berhasil melalui Diversi	11
C. CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL	
- Posbakum	11
- Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu	12
- Perkara Prodeo (Pembebasan Biaya Perkara)	12
BAB III SUMBER DAYA MANUSIA	
- Mutasi	13
- Promosi	13
- Pensiun	14
- Diklat (SDM Teknis/Non Teknis yang telah mengikuti Diklat)	14
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA, DAN TEKNOLOGI INFORMASI	
- Pengelolaan Keuangan	17
- Pengelolaan Sarana dan Prasarana	20
- Pengelolaan Teknologi Informasi	24

BAB V	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	
-	Pembangunan Zona Integritas	26
-	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	33
-	Inovasi Pelayanan Publik	43
BAB VI	PENGAWASAN	
-	Internal	51
-	Evaluasi	53
BAB VII	PENUTUP	
-	Kesimpulan	54
-	Rekomendasi	54

BAB I

PENDAHULUAN

1. KEBIJAKAN UMUM PERADILAN

Sebagai Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, bertujuan mewujudkan tata kehidupan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, dan tertib. Dalam rangka mewujudkan tata kehidupan tersebut dan menjamin persamaan kedudukan Warga Negara dalam Hukum diperlukan upaya untuk menegakkan ketertiban, keadilan, kebenaran, dan kepastian hukum yang mampu memberikan pengayoman kepada masyarakat, dalam kerangka tersebut dibutuhkan suatu lembaga peradilan untuk masyarakat umum. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum dilaksanakan oleh Pengadilan Negeri sebagai Pengadilan tingkat pertama dan Pengadilan Tinggi sebagai Pengadilan Tingkat Banding. Kekuasaan Kehakiman di lingkungan Peradilan Umum berpuncak pada Mahkamah Agung sebagai Pengadilan Negara Tertinggi.

Pengadilan merupakan barisan terdepan dalam kerangka penegakan hukum dan keadilan serta dalam proses pembangunan peradaban bangsa. Tegaknya hukum dan keadilan serta penghormatan terhadap keluhuran nilai kemanusiaan menjadi prasyarat tegaknya martabat dan integritas Negara. Aparat Penegak Hukum secara menyeluruh sebagai figur sentral dalam proses peradilan senantiasa dituntut untuk mengasah kepekaan nurani, memelihara kecerdasan moral dan meningkatkan profesionalisme dalam penegakan hukum dan keadilan masyarakat. Kebijakan Umum Pengadilan Negeri Baturaja secara umum tidak dapat dipisahkan dari kebijakan umum yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung RI selaku Pengadilan tertinggi dari Badan Peradilan di Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman. Secara umum sesuai tugas dan fungsi Badan Peradilan yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1984 tentang tentang perubahan Undang-undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, maka Pengadilan Negeri Baturaja yang merupakan Peradilan di bawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana Kekuasaan Kehakiman yang merdeka dengan tugas pokoknya menerima, memeriksa dan mengadili / memutuskan setiap perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan. Untuk keberhasilan Badan Peradilan dalam menjalankan tugas dan fungsinya kedepan, sudah saatnya Badan Peradilan beserta aparaturnya melakukan pembenahan-pembenahan dalam segala aspek tata manajemen organisasinya secara menyeluruh untuk dapat melaksanakan tugas-tugas dan fungsi tersebut dengan lebih

baik dan dapat memenuhi harapan masyarakat pencari keadilan, maka perlu adanya peningkatan sumber daya manusia aparatur badan peradilan dalam upaya memberikan layanan bagi masyarakat, membuka akses informasi kepada publik dalam rangka memberikan kebutuhan informasi terhadap kepentingan publik, meningkatkan kualitas / mutu putusan pengadilan, memperbaiki / menambah sarana dan prasarana yang didukung oleh anggaran yang memadai, meningkatkan kualitas Hakim dan Pegawai Peradilan yang memiliki standar intelektual dan integritas moral yang tinggi dan dipercaya, memiliki tanggung jawab dan disiplin kerja, serta melakukan pengawasan yang kontinyu terhadap aparatur Badan Peradilan.

2. KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pengadilan Negeri Baturaja merupakan lingkungan peradilan umum di bawah Mahkamah Agung RI sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakan Hukum dan Keadilan, Pengadilan Negeri Baturaja sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di bawah Pengadilan Tinggi Palembang yang menjadi kawal depan (*Voorj post*) Mahkamah Agung, **bertugas dan berwenang** menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama

Adapun fungsi dari Pengadilan Negeri Baturaja antara lain:

- **FUNGSI MENGADILI (*JUDICIAL POWER*)**
yakni menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan pengadilan dalam tingkat pertama.
- **FUNGSI PEMBINAAN**
yakni memberikan pengarahan, bimbingan, dan petunjuk kepada pejabat struktural dan fungsional di bawah jajarannya, baik menyangkut teknis yudicial, administrasi peradilan, maupun administrasi umum / perlengkapan, keuangan, kepegawaian, keterbukaan informasi, teknologi informasi dan pembangunan.
- **FUNGSI PENGAWASAN**
yakni mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera Pengganti, dan Jurusita/ Jurusita Pengganti di bawah jajarannya agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya dan terhadap pelaksanaan administrasi umum kesekretariatan serta pembangunan.
- **FUNGSI ADMINISTRATIF**
yakni menyelenggarakan administrasi peradilan (teknis dan persidangan), dan administrasi umum (kepegawaian, keuangan, dan umum/perlengkapan).

- **FUNGSI LAINNYA :**

Pelayanan penyuluhan hukum, pelayanan riset/penelitian dan sebagainya serta memberi akses yang seluas-luasnya bagi masyarakat dalam era keterbukaan dan transparansi informasi peradilan, sepanjang diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor: 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/II/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan. Dengan perubahan perundang-undangan tersebut, maka Badan Peradilan Umum telah menambah tugas kewenangan baik dalam pengelolaan manajemen peradilan, administrasi peradilan maupun bidang teknis yustisial.

3. VISI DAN MISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Baturaja. **Visi Pengadilan Negeri Baturaja** adalah "Mewujudkan Pengadilan Negeri Baturaja Yang Agung"

Penjelasan :

- Pengadilan Negeri Baturaja merupakan lembaga peradilan tingkat pertama yang berada dibawah wilayah hukum Pengadilan Tinggi Palembang dan berkedudukan di Baturaja dan Menangani Perkara Dalam 3 (Wilayah) yakni Kabupaten OKU, OKU Timur dan OKU Selatan.
- Agung menunjukkan suatu keadaan atau sifat kehormatan, kebesaran, kemuliaan dan keluhuran.

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan Pengadilan Negeri Baturaja dapat terlaksana dan terwujud dengan baik.

Misi Pengadilan Negeri Baturaja adalah sebagai berikut :

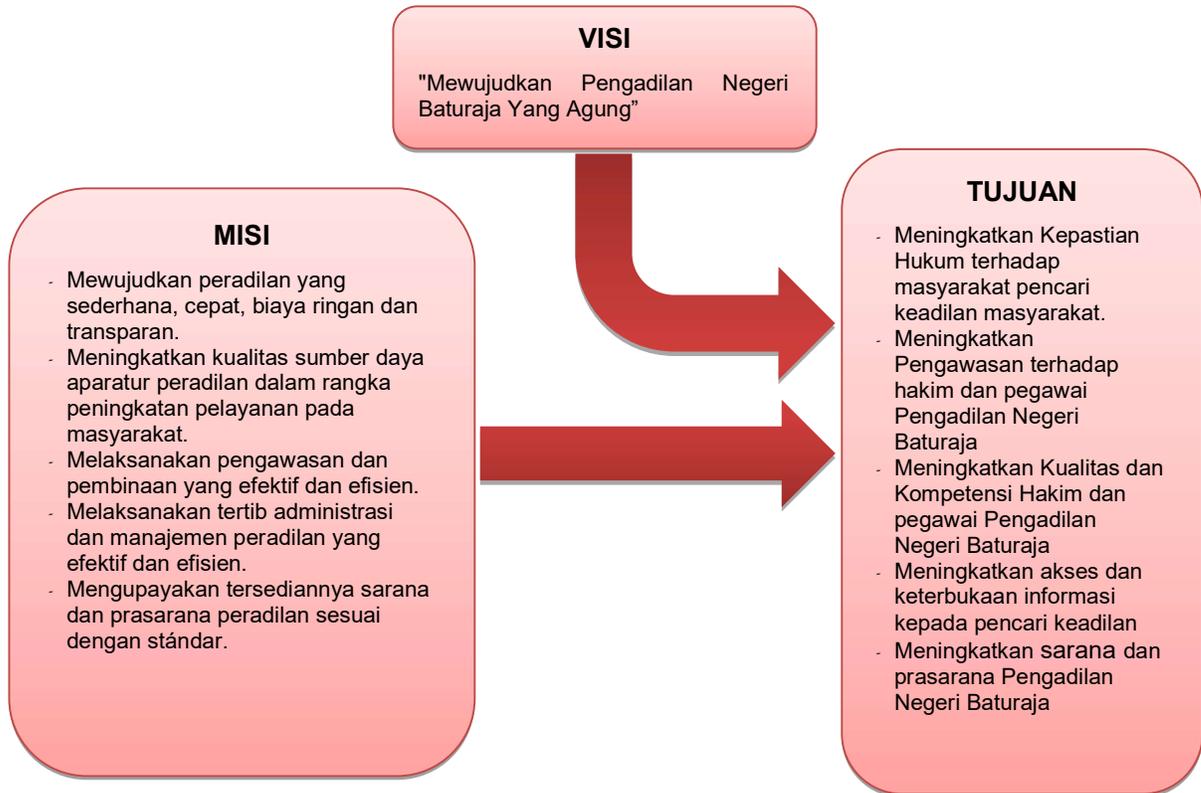
- Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan.
- Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
- Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan stándar.

Tujuan adalah yaitu sesuatu yang akan dihasilkan oleh suatu organisasi dalam jangka waktu tertentu, adapun tujuan yang ditetapkan Pengadilan Negeri Baturaja adalah sebagai berikut :

- Meningkatkan kepastian hukum terhadap masyarakat pencari keadilan masyarakat
- Meningkatkan pengawasan terhadap Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Baturaja
- Meningkatkan kualitas dan kompetensi Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Baturaja

- Meningkatkan akses dan keterbukaan informasi kepada pencari keadilan
- Meningkatkan sarana dan prasarana Pengadilan Negeri Baturaja

Bagan Hubungan Visi, Misi dan Tujuan



BAB II

KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM

A. KEADAAN PERKARA DI PERADILAN UMUM

No	Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Dicabut	Sisa	Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali	Diversi
A		PIDANA								
1	Pidana Biasa	88	605	593	0	100	43	22	0	0
2	Pidana Anak	2	50	51	0	1	2	0	0	6
3	Pidana Pra Peradilan	0	1	1	1	0	0	0	0	0
4	Pidana Lalu Lintas	0	8761	8761	0	0	0	0	0	0
5	Pidana Cepat	0	1	1	0	0	0	0	0	0
6	Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0	0	0	0

No	Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Putus	Dicabut	Sisa	Banding	Kasasi	Peninjauan Kembali	Eksekusi
B		PERDATA								
1	Perdata Gugatan	12	65	46	11	20	13	11	0	0
2	Perdata Gugatan Sederhana	4	66	38	25	7	0	0	0	0
3	Perdata Permohonan	5	161	158	5	3	0	0	0	0
4	Konsinyasi	6	67	73	0	0	0	0	0	0
5	Perlawanan/Bantahan	1	0	1	0	1	1	1	0	0

No	Perkara	Sisa Tahun Lalu	Masuk	Dicabut	Aanmaning	Pelaksanaan	Sisa
C		EKSEKUSI					
1	Eksekusi	4	2	2	2	0	4

B. PENYELESAIAN PERKARA

- Jumlah Sisa Perkara yang Diputus

SISA PERKARA PIDANA DIPUTUS					
Klasifikasi Perkara	Sisa Perkara Tahun 2022 (A)	Perkara Masuk Tahun 2023 (B)	Perkara Dicabut Tahun 2023 (C)	Perkara Putus Tahun 2023 (D)	Sisa Perkara Tahun 2023 (A+B-C-D)
Perkara Pidana Umum					
Pidana Biasa	88	605	0	593	100
Pidana Anak	2	50	0	51	1
Pidana Singkat	0	0	0	0	0
Pidana Pra Peradilan	0	1	1	1	0
Pidana Cepat	0	1	0	1	0
Pidana Lalu Lintas	0	8761	0	8761	0
Total	90	9418	1	9407	101

SISA PERKARA PERDATA YANG DIPUTUS					
Klasifikasi Perkara	Sisa Perkara Tahun 2022 (A)	Perkara Masuk Tahun 2023 (B)	Perkara Dicabut Tahun 2023 (C)	Perkara Putus Tahun 2023 (D)	Sisa Perkara Tahun 2023 (A+B-C-D)
Perkara Perdata Umum					
Gugatan	12	65	11	46	20
Gugatan Sederhana	4	66	25	38	7
Permohonan	5	161	5	158	3
Permohonan Konsinyasi	6	67	0	73	0
Perlawanan/Bantahan	1	0	0	1	0
Total	28	359	41	316	30

- Jumlah Perkara yang Diputus Tepat Waktu

PERKARA PIDANA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU						
Klasifikasi Perkara	Sisa Perkara Tahun 2022 (A)	Perkara Masuk Tahun 2023 (B)	Perkara Dicabut Tahun 2023 (C)	Perkara Putus Tahun 2023 (D)	Perkara yang Diminutasi Tahun 2023 (E)	
					Tepat Waktu (<=5 Bulan)	Melebihi >5 Bulan
Perkara Pidana Umum						
Pidana Biasa	88	605	0	593	593	0
Pidana Anak	2	50	0	51	51	0
Pidana Singkat	0	0	0	0	0	0
Pidana Pra Peradilan	0	1	1	1	1	0
Pidana Cepat	0	1	0	1	1	0
Pidana Lalu Lintas	0	8761	0	8761	8761	0
Total	90	9418	1	9407	9407	0

PERKARA PERDATA YANG DISELESAIKAN TEPAT WAKTU						
Klasifikasi Perkara	Sisa Perkara Tahun 2022 (A)	Perkara Masuk Tahun 2023 (B)	Perkara Dicabut Tahun 2023 (C)	Perkara Putus Tahun 2023 (D)	Perkara yang Diminutasi Tahun 2023 (E)	
					Tepat Waktu (<=5 Bulan)	Melebihi >5 Bulan
Perkara Perdata						
Perdata Gugatan	12	65	11	46	50	7
Perdata Gugatan Sederhana	4	66	25	38	63	0
Perdata Permohonan	5	161	5	158	163	0
Konsinyasi	6	67	0	73	73	0
Perlawanan/Bantahan	1	0	0	1	1	0
Total	28	359	41	316	350	7

- Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding, Kasasi dan PK

PERKARA PIDANA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM TAHUN 2023				
Jenis Perkara	Putus	Tidak Mengajukan Banding	Tidak Mengajukan Kasasi	Tidak Mengajukan PK
Pidana Biasa	593	550	571	593
Pidana Anak	51	49	51	51
Pidana Cepat	1	1	1	1
Pidana Singkat	0	0	0	0
Pidana Pra Peradilan	1	1	1	1

PERKARA PERDATA YANG TIDAK MENGAJUKAN UPAYA HUKUM TAHUN 2023				
Jenis Perkara	Putus	Tidak Mengajukan Banding	Tidak Mengajukan Kasasi	Tidak Mengajukan PK
Gugatan	57	44	46	57
Gugatan Sederhana	63	63	63	63
Permohonan	163	163	163	163

- Jumlah Perkara Perdata yang Berhasil Dimediasi

PERKARA PERDATA YANG BERHASIL DIMEDIASI			
Jenis Perkara	Jumlah Perkara	Berhasil Mediasi	Keterangan
Gugatan	28	4	-
Gugatan Sederhana	0	0	-

- Jumlah Perkara Anak yang Berhasil Melalui Diversi

Klasifikasi Perkara	DIVERSI PADA PERKARA PIDANA ANAK TAHUN 2023					
	Bulan	Masuk	Pengajuan Diversi		Keberhasilan Diversi	
			Diajukan Diversi	Tidak Diajukan Diversi	Diversi Berhasil	Diversi Gagal
Pidana Anak	Januari	2	0	2	0	0
	Februari	3	0	3	0	0
	Maret	10	2	8	1	1
	April	4	1	3	0	1
	Mei	6	1	5	0	1
	Juni	4	1	3	0	1
	Juli	10	0	10	0	0
	Agustus	3	0	3	0	0
	September	1	0	1	0	0
	Oktober	4	0	4	0	0
	November	2	1	1	0	1
	Desember	1	0	1	0	0

C. CAPAIAN PRIORITAS NASIONAL

Akreditasi penjaminan mutu bertujuan mewujudkan performa peradilan yang unggul (prima). Akreditasi penjaminan mutu Indonesia Court Performance Excellence (ICPE) merupakan ISO plus. ICPE meliputi manajemen mutu ISO diperkaya dengan International Framework Court Excellence (IFCE), pelaksanaan reformasi birokrasi (RB), pembangunan zona integritas, standar pengawasan Badan Pengawasan MA dan standar penilaian Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum.

- Posbakum

Berdasarkan Undang-Undang No 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum, Pasal 1 (1) dinyatakan bahwa Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin yang tidak dapat memenuhi hak dasar secara layak dan mandiri yang menghadapi masalah hukum. Sedangkan dalam SEMA No 10 tahun 2010 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Hukum dinyatakan bahwa yang berhak mendapatkan jasa dari Pos Bantuan Hukum adalah orang yang tidak mampu membayar jasa Advokat terutama perempuan dan anak-anak serta penyandang disabilitas, sesuai pertauran perundang-undangan yang berlaku. (Pasal 27).

Realisasi Anggaran Posbakum Pengadilan Negei Baturaja Tahun 2023

NO.	ANGGARAN POSBAKUM	REALISASI ANGGARAN	KETERANGAN
1	28.800.000	28.800.000	-

- Sidang Keliling/Pelayanan Terpadu

Pengadilan Negeri Baturaja merupakan Pengadilan Negeri yang menangani perkara di 3 (tiga) Kabupaten. Untuk mempermudah masyarakat dalam mendapatkan pelayanan hukum selain di Kabupaten Ogan Komering Ulu (Baturaja), Pengadilan Negeri Baturaja juga Memberikan Pelayanan Sidang Keliling ke Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur (Martapura) dan Ogan Komering Ulu Selatan (Muaradua).

NO.	SIDANG KELILING	ANGGARAN	REALISASI ANGGARAN
1	Martapura dan Muaradua	242.000.000	234.066.000

- Perkara Prodeo

Realisasi anggaran perkara prodeo Pengadilan Negeri Baturaja tahun 2023 dapat dijelaskan pada tabel dibawah ini :

NO.	ANGGARAN PERKARA PRODEO	REALISASI ANGGARAN	KETERANGAN
1.	-	-	-

BAB III

SUMBER DAYA MANUSIA

A. SUMBER DAYA MANUSIA

Aparatur Pengadilan Negeri Baturaja tahun 2023 baik tenaga teknis yudisial maupun non yudisial seluruhnya berjumlah 36 orang, yang terdiri dari Hakim 10 orang, Pejabat Teknis 4 orang, Pejabat Struktural 4 orang, Panitera Pengganti 6 orang, Juru Sita 3 orang, Juru Sita Pengganti 1 orang, dan Staf 8 orang. Untuk meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan lembaga Peradilan) baik tenaga teknis maupun non teknis agar berkualitas tinggi, bermoral dan mempunyai integritas yang dapat dibanggakan, serta memiliki pemahaman dan tekad untuk senantiasa berpedoman pada etika kekuasaan kehakiman dalam segala perbuatan dan tingkah lakunya didalam maupun diluar kedinasan, perlu diadakan pengelolaan dan pembinaan dari Sumber Daya Manusia tersebut dengan cara:

- Mutasi

Mutasi bagi Hakim merupakan suatu hal yang lumrah, karena itu kesiapan mental sejak mendaftar sebagai Calon Hakim, sudah siap dimana saja ditugaskan di wilayah Republik Indonesia, karena itu patut disayangkan bila masih ada Hakim yang melakukan peninjauan kembali kepada Ketua Mahkamah Agung setelah ditempatkan pada suatu daerah dengan berbagai alasan yang tidak rasional.

MUTASI HAKIM			
No.	Nama/NIP	Jabatan	Tempat Mutasi
1.	Hendri Agustian, S.H., M.H. NIP. 19750801 200502 1 001	Ketua Pengadilan Negeri Baturaja	Ketua Pengadilan Negeri Cikarang

MUTASI KARYAWAN			
No.	Nama/NIP	Jabatan	Tempat Mutasi
1.	-	-	-

- Promosi

Demikian hal mutasi karena promosi jabatan juga suatu hal yang wajar sebab promosi merupakan jenjang karir yang harus dilalui jika prestasi kerja seorang Hakim selalu baik tanpa cacat.

PROMOSI / USUL PENGISIAN JABATAN STRUKTURAL DAN FUNGSIONAL			
No.	Nama/NIP	Jabatan	Usul Promosi
1.	-	-	-

- Pensiun

PENSIUN PEGAWAI			
No.	Nama/NIP	Jabatan	TMT Pensiun
1.	-	-	-

- Diklat

PELATIHAN TEKNIS YUDISIAL TAHUN 2022			
No.	Nama	Jenis Pelatihan	Tanggal
1.	Ferdinaldo H. Bonodikun, S.H., M.H.	<p>Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Pidana Narkotika Bagi Hakim Peradilan Umum Seluruh Indonesia bertempat di Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Jl. Cikopo Selatan Desa Sukamaju Kec. Megamendung Kab. Bogor Jawa Barat 16770.</p> <p>Pelatihan Sertifikasi Mediator Bagi Hakim Tingkat Pertama Peradilan Umum Seluruh Indonesia bertempat di Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Jl. Cikopo Selatan Desa Sukamaju Kec. Megamendung Kab. Bogor Jawa Barat 16770.</p> <p>Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Pidana Kekerasan Seksual bagi Hakim Peradilan Umum Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan Palembang bertempat di Swiss-Belhotel pangkal Pinang</p> <p>Mengikuti Bimbingan Teknis Pengembangan Kompetensi ASN melalui Pembangunan Zona Integritas pada Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja di Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri Se-Sumatera Selatan. bertempat di Hotel Harper Palembang Jl. R. Sukanto No. 20, Palembang.</p>	<p>02 April 2023 s.d 07 April 2023</p> <p>05 Mei 2023 s.d 19 Mei 2023 Tahap I dan tanggal 21 Mei 2023 s.d 31 Mei 2023 Tahap II</p> <p>20 Februari 2023 s.d 04 Maret 2023</p> <p>22 s.d 24 November 2023</p>
2.	M. Fahri Ikhsan, S.H.	<p>Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Pidana Kekerasan Seksual bagi Hakim Peradilan Umum Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan Palembang bertempat di Swiss-Belhotel Pangkal Pinang</p>	<p>20 Februari 2023 s.d 04 Maret 2023</p>

3.	I Made Gede Kariana, S.H.	Mengikuti Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Pidana Narkotika Bagi Hakim Peradilan Umum Seluruh Indonesia bertempat di Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Jl. Cikopo Selatan Desa Sukamaju Kec. Megamendung Kab. Bogor Jawa Barat 16770.	02 April 2023 s.d 07 April 2023
4.	Fega Uktolseja, S.H., M.H.	Pelatihan Teknis Yudisial Tindak Pidana Kekerasan Seksual bagi Hakim Peradilan Umum Wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Bangka Belitung dan Palembang bertempat di Swiss-Belhotel pangkal Pinang	20 Februari 2023 s.d 04 Maret 2023
5.	Salihin Ardiansya, S.H., M.H.	Pelatihan Hakim Berkelanjutan I (CJE I) peradilan Umum seluruh Indonesia melalui Pembelajaran Mandiri E-Learning bertempat di Pusdiklat Badan Litbang Diklat Kumdil MARI	30 Januari 2023 s.d 11 Februari 2023
6.	Yessi Oktarina, S.H.	Mengikuti Undangan Uji Publik dan Knowledge Sharing Buku Saku SIPP-EIS bagi Pimpinan Pengadilan Tahun 2023 pada Pusdiklat Manajemen dan Kepemimpinan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI	06 Maret s.d 09 Maret 2023;
7.	Arie Septi Zahara, S.H.	Mengikuti Pelatihan Pemantapan KEPPH bertempat di Aston Bogor Hotel & Resort - Jl. Dreded Pahlawan, Bogor 16132 Mengikuti Pelatihan Eksplorasi Pelanggaran KEPPH, Studi Kasus Laporan Masyarakat di Komisi Yudisial bertempat di Hotel Radisson Lampung Kedaton Jl. Teuku Umar – Sultan Agung No. 1 Bandar Lampung;	13 Maret 2023 s.d 18 Maret 2023 29 Agustus 2023 s.d 1 September 2023
8.	Alidin, S.H., M.H.	Mengikuti Bimbingan Teknis Pengembangan Kompetensi ASN melalui Pembangunan Zona Integritas pada Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja di Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri Se-Sumatera Selatan. bertempat di Hotel Harper Palembang Jl. R. Sukanto No. 20, Palembang.	22 November s.d 24 November 2023

9.	RR. Shandy Satyo Asih, S.E., S.H.	Mengikuti Pelatihan Teknis Yudisial Panitera / Panitera Pengganti Peradilan Umum Seluruh Indonesia bertempat di Pusdiklat Mahkamah Agung RI, Jl. Cikopo Selatan Desa Sukamaju Kec. Megamendung Kab. Bogor Jawa Barat 16770.	26 Juli 2023 s.d 28 Juli 2023 Tahap I dan tanggal 31 Juli 2023 s.d 05 Agustus 2023 Tahap II
10.	Ahmad Sulaiman, S.H.	Mengikuti Pelatihan Teknis Yudisial Jurusita dan Jurusita Pengganti Lingkungan Peradilan Umum Seluruh Indonesia bertempat di Jalan Cikopo Selatan, Desa Sukamaju, Kec. Megamendung, Bogor – Jawa Barat.	25 s.d. 29 September 2023 tahap I dan tanggal 1 s.d. 7 Oktober 2023 tahap II

PELATIHAN TEKNIS NON YUDISIAL TAHUN 2022			
No.	Nama	Jenis Pelatihan	Tanggal
1.	Dwi Joko Handoyo, S.H.	Mengikuti Pelatihan Manajemen Pengelolaan Barang Milik Negara Bekerjasama dengan Diklat PKN BPK RI di Wilayah Jakarta Gelombang II Angkatan I s.d IV Tahun 2023 bertempat di Pusdiklat BPK RI Jl. Raya Kalibata, RT.6/RW.7, Kalibata, Jakarta Selatan	15 Mei 2023 s.d 17 Mei 2023
2.	Hendra Gunawan Saputra, S.Kom.	Mengikuti Bimbingan Teknis Pengembangan Kompetensi ASN melalui Pembangunan Zona Integritas pada Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja di Pengadilan Tinggi Palembang dan Pengadilan Negeri Se-Sumatera Selatan. bertempat di Hotel Harper Palembang Jl. R. Sukanto No. 20, Palembang.	22 s.d 24 November 2023
3.	Verina Inez Nabilah, A.Md.A.B.	Mengikuti Sosialisasi Kepmensos Nomor 221 Tahun 2022 tentang Sentra Layanan Sosial pada Balai Besar Pendidikan dan Pelatihan Kesejahteraan Sosial, Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung dan Pusat Pendidikan, Pelatihan dan Pengembangan Profesi bertempat di Dinas Sosial Kabupaten OKU;	01 Agustus 2023

BAB IV

PENGELoAAN KEUANGAN, SARANA DAN PRASARANA

A. PENGELOLAAN KEUANGAN

Pada Tahun 2023 Pengadilan Negeri Baturaja Tahun mendapatkan alokasi anggaran sebesar dengan rincian sebagai berikut :

- DIPA 01 Badan Urusan Administrasi

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa (Rp)	Capaian (%)
Belanja Pegawai	4.387.692.000	4.158.166.907	(229.525.093)	94,77
Belanja Barang	1.632.267.000	1.569.068.004	(63.198.996)	96,13
Belanja Modal	275.000.000	274.800.000	(200.000)	99,93

RINCIAN REALISASI BELANJA PEGAWAI (DIPA 01)					
No.	Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	511111	Belanja Gaji Pokok PNS	1.776.870.000	1.648.336.160	92,77
2.	511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS	32.000	29.103	90,95
3.	511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	168.289.000	116.315.710	69,12
4.	511122	Belanja Tunj. Anak PNS	41.821.000	38.649.956	92,42
5.	511123	Belanja Tunj. Struktural PNS	39.040.000	36.400.000	93,24
6.	511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS	1.797.261.000	1.778.750.000	98,97
7.	511125	Belanja Tunj. PPh PNS	178.474.000	170.664.238	95,62
8.	511126	Belanja Tunj. Beras PNS	108.425.000	101.170.740	93,31
9.	511129	Belanja Uang Makan PNS	256.080.000	248.636.000	97,09
10.	511151	Belanja Tunjangan Umum PNS	21.400.000	19.215.000	89,79

RINCIAN REALISASI BELANJA BARANG (DIPA 01)					
No.	Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	521111	Belanja keperluan perkantoran (Kebutuhan Sehari-hari Perkantoran)	501.440.000	501.420.621	100
2.	521111	Belanja keperluan perkantoran (Langganan Daya dan Jasa)	171.000.000	171.000.000	100
3.	521111	Belanja keperluan perkantoran (Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor)	33.640.000	33.640.000	100
4.	521114	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	12.000.000	12.000.000	100

5.	521115	Belanja honor operasional satker	57.282.000	57.276.000	99,99
6.	521119	Belanja barang operasional lainnya (Rapat Koordinasi Internal)	9.720.000	9.186.000	94,51
7.	521811	Belanja barang persediaan barang konsumsi	40.321.000	40.311.800	99,98
8.	521111	Belanja Keperluan Perkantoran (Langganan Daya dan Jasa)	171.000.000	171.000.000	100
9.	522112	Belanja langganan telepon	12.000.000	8.186.957	68,22
10.	522113	Belanja langganan air	36.000.000	3.817.471	10,60
11.	522141	Belanja Sewa	8.000.000	8.000.000	100
12.	523111	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan	341.887.000	341.887.000	99,80
13.	523119	Belanja pemeliharaan gedung dan bangunan lainnya	83.450.000	83.109.038	99,59
14.	523121	Belanja pemeliharaan peralatan dan mesin	204.770.000	203.858.155	99,55
15.	524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	57.600.000	48.061.962	83,44
16.	522191	Belanja Jasa Lainnya (Swab/Antigen)	360.000	300.000	83,33
17.	521119	Belanja barang operasional lainnya (Penanganan Covid-19)	2.722.000	2.640.000	96,99
18.	522191	Belanja Jasa Lainnya (Penyemprotan Disinfektan)	3.600.000	3.600.000	100

RINCIAN REALISASI BELANJA MODAL (DIPA 01)					
No.	Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
1.	532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin (Pengadaan Genset)	275.000.000	274.800.000	99,93

- DIPA 03 Badan Peradilan Umum

Jenis Belanja	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Sisa	Capaian (%)
Pos Bantuan Hukum	28.800.000	28.800.000	0	100
Sidang di Luar Gedung Pengadilan	242.000.000	234.066.000	7.934.000	96,72
Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat	221.500.000	187.497.200	34.002.800	84,65
Percepatan Penyelesaian Perkara	-	-	-	-

RINCIAN REALISASI BELANJA BARANG (DIPA 03)					
No.	Kode Akun	Uraian	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Capaian (%)
Pos Bantuan Hukum					
1.	522131	Belanja Jasa Konsultan	28.800.000	28.800.000	100
Sidang di Luar Gedung Pengadilan					
1.	524111	Belanja Perjalanan Biasa	242.000.000	234.066.000	96,72
Perkara Pidana yang Diselesaikan Ditingkat Pertama di wilayah Barat					
Pendaftaran berkas perkara					
1.	521211	Belanja bahan	8.010.000	6.480.000	80,90
2.	521811	Belanja barang persediaan barang konsumsi	92.875.000	92.869.700	99,99
Penetapan hari sidang					
1.	524113	Belanja perjalanan dinas dalam kota	11.000.000	8.550.000	77,73
Pengiriman surat penahanan dan perpanjangan penahanan					
1.	521114	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	8.900.000	8.900.000	100
2.	524113	Belanja perjalanan dinas dalam kota	16.200.000	6.600.000	40,74
Pemeriksaan di sidang pengadilan					
1.	521211	Belanja bahan	27.525.000	10.907.500	39,63
Pengiriman Petikan/ Salinan Putusan Kepada JPU dan Terdakwa					
1.	521114	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	10.200.000	10.200.000	100
2.	524113	Belanja perjalanan dinas dalam kota	15.000.000	11.600.000	77,33
Minutasi/Upaya hukum					
1.	521211	Belanja bahan	20.280.000	20.280.000	100
Penanganan perkara banding di Pengadilan Tingkat pertama					
1.	521114	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	4.410.000	4.410.000	100
2.	524113	Belanja perjalanan dinas dalam kota	3.000.000	2.600.000	86,67
Penanganan perkara kasasi dan Peninjauan Kembali di Pengadilan Tingkat pertama					
1.	521114	Belanja pengiriman surat dinas pos pusat	1.600.000	1.600.000	100
2.	524113	Belanja perjalanan dinas dalam kota	1.000.000	1.000.000	100
Percepatan Penyelesaian Perkara					
1.	524113	Belanja perjalanan dinas dalam kota	1.500.000	1.500.000	100

B. PENGELOLAAN SARANA DAN PRASARANA

Berikut Keadaan Sarana dan Prasarana Pengadilan Negeri Baturaja 2023

- MATRIK SARANA/PRASARANA DI WILAYAH HUKUM

No	Uraian	Jumlah	Keterangan
Pengadilan Negeri Baturaja			
A. Ruangan:			
1.	Ruang Ketua	1 (satu)	Baik
2.	Ruang Wakil Ketua	1 (satu)	Baik
3.	Ruang Hakim	1 (satu)	Baik
4.	Ruang Panitera	1 (satu)	Baik
5.	Ruang Sekretaris	1 (satu)	Baik
6.	Ruang Sidang	4 (empat)	Baik
7.	Ruang Sidang ZittingPlatz di Muaradua	1 (satu)	Baik
8.	Ruang Sidang ZittingPlatz di Martapura	1 (satu)	Baik
9.	Ruang Kepaniteraan	3 (tiga)	Baik
10.	Ruang Kesekretariatan	3 (tiga)	Baik
11.	Ruang Panitera Pengganti	1 (satu)	Baik
12.	Ruang Arsip Perkara Pidana	2 (dua)	Baik
13.	Ruang Arsip Perkara Perdata	1 (satu)	Baik
14.	Ruang Mediasi/Diversi	1 (satu)	Baik
15.	Ruang Juru Sita	1 (satu)	Baik
16.	Ruang Perpustakaan	1 (satu)	Baik
17.	Ruang Rapat/ <i>Command Center</i>	1 (satu)	Baik
18.	Musholla	1 (satu)	Baik
19.	Ruang Posbakum	1 (satu)	Baik
20.	Ruang Kesehatan/Laktasi	1 (satu)	Baik
21.	Ruang Pengacara/Bapas	1 (satu)	Baik
22.	Ruang Jaksa/PU	1 (satu)	Baik
23.	Ruang Persediaan	1 (satu)	Baik
24.	Ruang Tahanan Pria	1 (satu)	Baik
25.	Ruang Tahanan Wanita	1 (satu)	Baik
26.	Ruang Tunggu Ramah Anak	2 (dua)	Baik
27.	Ruang <i>Podcast</i>	1 (satu)	Baik
28.	Area <i>Smoking</i> /Taman Hijau	1 (satu)	Baik
29.	Kantin	1 (satu)	Baik
30.	Ruang PTSP	1 (satu)	Baik
31.	Ruang Server	1 (satu)	Baik
32.	Ruang Difabel	1 (satu)	Baik
33.	Gudang	1 (satu)	Baik
34.	Parkir Kendaraan	2 (dua)	Baik
35.	Dapur/ <i>Pantry</i>	1 (satu)	Baik
36.	Pos Satpam	1 (satu)	Baik
37.	Ruang Transit Hakim dan Panitera	3 (tiga)	Baik
38.	Ruang Tamu Terbuka	2 (dua)	Baik
39.	Ruang Konfirmasi Antrian Sidang	1 (satu)	Baik
40.	Ruang Alat Kebersihan/ <i>Storage</i>	2 (dua)	Baik
41.	Ruang Bermain Anak	1 (satu)	Baik
42.	Ruang Kerja Bersama/ <i>Coworking Space</i>	1 (satu)	Baik

B. Peralatan Kantor:			
1.	Gambar Presiden/Wakil Presiden	1 (satu)	Baik
2.	Lambang Garuda Pancasila	5 (lima)	Baik
3.	Jam Elektronik	4 (empat)	Baik
4.	Palu Sidang	3 (tiga)	Baik
5.	Ac Split	51 (lima satu)	Baik
6.	Router	4 (empat)	Baik
7.	Server	2 (dua)	Baik
8.	Pompa Air	2 (dua)	Baik
9.	Amplifier	1 (satu)	Baik
10.	Megaphone	2 (dua)	Baik
11.	Pesawat Telephone	1 (satu)	Baik
12.	Facsimile	2 (dua)	Baik
13.	Mesin Hitung Elektronik/ <i>Calculator</i>	1 (satu)	Baik
14.	Pc. Unit	52 (lima dua)	Baik
15.	Printer	31 (tiga satu)	Baik
16.	Speaker Komputer	3 (tiga)	Baik
17.	Dispenser	5 (lima)	Baik
18.	Rak Kayu	16 (satu enam)	Baik
19.	Meja Komputer	24 (dua empat)	Baik
20.	Meja Rapat	3 (tiga)	Baik
21.	Meja Kerja Kayu	109 (satu nol sembilan)	Baik
22.	Sice	22 (dua dua)	Baik
23.	Kipas Angin	16 (satu enam)	Baik
24.	Lemari Penyimpanan	48 (empat delapan)	Baik
25.	Lemari Besi/metal	20 (dua nol)	Baik
26.	Rak Besi	6 (enam)	Baik
27.	Bangku Panjang Kayu	58 (lima delapan)	Baik
28.	Kursi Besi/Metal	205 (dua nol lima)	Baik
29.	Kursi Kayu	63 (enam tiga)	Baik
30.	Whiteboard	2 (dua)	Baik
31.	Papan Visual/Papan Nama	47 (empat tujuh)	Baik
32.	Filing Cabinet Besi	26 (dua enam)	Baik
33.	Brandkas	3 (tiga)	Baik
34.	Alat Penyimpan Perlengkapan Kantor Lainnya	501 (lima nol satu)	Baik
35.	Mesin Absensi	1 (satu)	Baik
36.	Bangku Panjang/Besi	8 (delapan)	Baik
37.	Meja Resepsionis	1 (satu)	Baik
38.	Meja Makan Kayu	3 (tiga)	Baik
39.	Mixer	1 (satu)	Baik
40.	Lambang Instansi	1 (satu)	Baik
41.	Mic Conference	5 (lima)	Baik
42.	Bracket Standing Peratatan	1 (satu)	Baik
43.	UPS	13 (satu tiga)	Baik
44.	Power Amplifier	1 (satu)	Baik
45.	Microphone Cable	5 (lima)	Baik
46.	Camera Digital	1 (satu)	Baik
47.	LCD Monitor PC	4 (empat)	Baik
48.	TV Connector	1 (satu)	Baik
49.	Laptop	19 (satu sembilan)	Baik

50.	Note Book	5 (lima)	Baik
51.	Scanner	4 (empat)	Baik
52.	Telephone (PABX)	2 (dua)	Baik
53.	CCTV	2 (dua)	Baik
54.	Running Text	2 (dua)	Baik
55.	Sound Sistem	2 (dua)	Baik
56.	TV Monitor	4 (empat)	Baik
57.	Mesin Antrian	1 (satu)	Baik
58.	Scanner Office	2 (dua)	Baik
59.	Layar Proyektor	2 (dua)	Baik
60.	Mesin Barcode	1 (satu)	Baik
61.	Rak Server	1 (satu)	Baik
62.	Lemari Kayu	1 (satu)	Baik
63.	Sofa	1 (satu)	Baik
64.	Lemari Es	1 (satu)	Baik
65.	Loudspeaker	12 (satu dua)	Baik
66.	Stabilisator	12 (satu dua)	Baik
67.	Audio Mixing Console	1 (satu)	Baik
68.	Video Conference	1 (satu)	Baik
69.	Finger Printer Time and Attendance Acces	2 (dua)	Baik
70.	Boneka Resucitasi Anne	1 (satu)	Baik
71.	Local Area Network (LAN)	1 (satu)	Baik
72.	Mini Komputer	1 (satu)	Baik
73.	Komputer Jaringan Lainnya	2 (dua)	Baik

- KENDARAAN DINAS

No.	Uraian	Tahun Perolehan	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
Pengadilan Negeri Baturaja						
A. Kendaraan Roda 4						
1.	Toyota Kijang Avanza BG 1696 VZ	2013	Baik	-	-	Pinjam pakai Pemda Muara Dua
2.	Suzuki/APV GL BG 1058 YZ	2012	Baik	-	-	Pinjam pakai Pemda Martapura
3.	Toyota /Kijang Inova E BG 1230 FZ	2008	-	-	Rusak Berat	
4.	Toyota/Kijang KF 80 BG 1231 FZ	2003	-	-	Rusak Berat	
5.	Fortuner BG 5 F	2019	Baik	-	-	Hibah Pemda OKU
6.	Innova 2.0 BG 1225 ID	2021	Baik	-	-	Sewa MA
7.	Innova Zenix BG 1120 VZ	2023	Baik	-	-	Pinjam pakai Pemda Muara Dua
8.	Innova Reborn BG 1297 YZ	2022	Baik	-	-	Pinjam pakai Pemda Martapura
B. Kendaraan Roda 2						
1.	Honda/N F 125 SD BG 2639 FZ	2005	-	-	Rusak Berat	

2.	Honda/N F 125 SD BG 2638 FZ	2005	-	-	Rusak Berat	
3.	Honda/GL Pro III Sport BG 5796 FZ	2005	-	-	Rusak Berat	
4.	Honda/N F 125 TR BG 6377 FZ	2009	-	-	Rusak Berat	
5.	Honda/N F 125 TR BG 6379 FZ	2009	-	-	Rusak Berat	
6.	Honda/N F 125 BG 6375 FZ	2008	-	-	Rusak Berat	
7.	Honda/NF 125 BG 6378 FZ	2009	-	-	Rusak Berat	
8.	Honda Supra X NF 100 D BG 6691 FZ	2003	-	-	Rusak Berat	

- RUMAH DINAS

No.	Uraian	Jumlah	Kondisi			Ket
			Baik	Rusak Ringan	Rusak Berat	
Pengadilan Negeri Baturaja						
1.	Rumah Dinas Ketua	1 (satu)	Baik	-	-	Pinjam pakal Pemda OKU
2.	Rumah Dinas Ketua	1 (satu)	Baik	-	-	di daerah Air Gading, Kec. Sukaraya
3.	Rumah Dinas Wakil Ketua	1 (satu)	Baik	-	-	
4.	Komplek Rumah Dinas	9 (sembilan)	Baik	-	-	<ul style="list-style-type: none"> • 7 (tujuh) unit berupa Rumah Dinas Hakim • 1 (satu) unit berupa Mess Pegawai • 1 (satu) unit berupa Rumah Dinas Panitera

C. PENGELOLAAN TEKNOLOGI INFORMASI

Dukungan Teknologi Informasi Pengadilan Negeri Baturaja berupa Perangkat Keras (*Hardware*) dan Perangkat Lunak (*Software*) sebagai berikut :

- Perangkat Keras

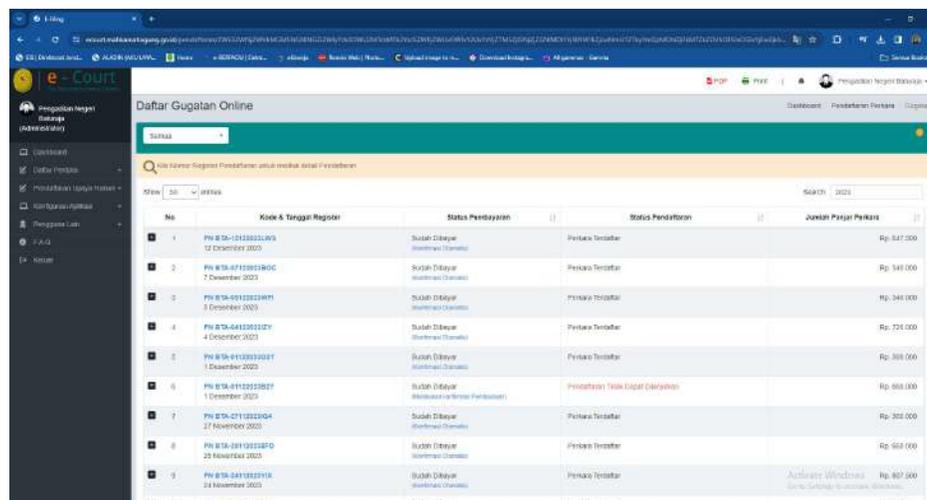
Untuk menunjang keterbukaan informasi, Pengadilan Negeri Baturaja telah mempunyai 2 komputer untuk server dan unit-unit terhubung untuk melaksanakan aplikasi perkara / SIPP. 1 (satu) unit Perangkat Mikrotik, 1 (satu) unit Rak Server, 1 (satu) Anjungan Informasi Mandiri juga telah dimiliki Pengadilan Negeri Baturaja, sebagai media informasi masyarakat secara mandiri mencari informasi yang terletak di Ruang Tunggu dan 1 (satu) Anjungan Antrian Persidangan di Ruang Tunggu Pengunjung Sidang.

- Perangkat Lunak

Untuk Sistem Operasi Penelusuran Perkara Pengadilan Negeri Baturaja menggunakan OS Centos 7 yang telah terinstal pada Server SIPP Lokal yang terintegrasi dengan aplikasi database seperti phpmyadmin. Website Pengadilan Negeri Baturaja bisa diakses pada tautan <http://pn-baturaja.go.id> dan telah disesuaikan dengan template website peradilan umum, Aplikasi Penelusuran Perkara CTS/SIPP yang sudah mendukung implementasi e-Court, e-Litigasi dan e-Berpadu pada Pengadilan Negeri Baturaja dan dapat diakses pada tautan <http://sipp.pn-baturaja.go.id>, serta aplikasi pendukung seperti Aplikasi SAKPA, Aplikasi SIMAK BMN, Aplikasi Kepegawaian / SIKEP dari BKN.

- Implementasi E-Court

Sampai Dengan Tanggal 31 Desember 2023, Pengadilan Negeri Baturaja telah mengimplementasikan e-Court dalam pendaftaran perkara. Klasifikasi perkaranya yaitu gugatan sebanyak 69 perkara, permohonan sebanyak 158 perkara, gugatan sederhana sebanyak 67 perkara dan bantahan sebanyak 0 perkara.



The screenshot displays the 'Daftar Gugatan Online' (Online Case Registration List) interface. It features a search bar at the top and a table with columns for 'No', 'Kode & Tanggal Register', 'Status Pembayaran', 'Status Pendaftaran', and 'Jumlah Pajak Perkara'. The table lists 10 cases with their respective details.

No	Kode & Tanggal Register	Status Pembayaran	Status Pendaftaran	Jumlah Pajak Perkara
1	PN BTA-1312022LW9 12 Desember 2023	Sudah Dibayar (Membayar)	Perkara Tertarik	Rp. 547.000
2	PN BTA-0712022W0C 7 Desember 2023	Sudah Dibayar (Membayar)	Perkara Tertarik	Rp. 547.000
3	PN BTA-0912022W1T 8 Desember 2023	Sudah Dibayar (Membayar)	Perkara Tertarik	Rp. 344.000
4	PN BTA-0412022ZV 4 Desember 2023	Sudah Dibayar (Membayar)	Perkara Tertarik	Rp. 720.000
5	PN BTA-012022Z01F 1 Desember 2023	Sudah Dibayar (Membayar)	Perkara Tertarik	Rp. 300.000
6	PN BTA-012022Z02F 1 Desember 2023	Sudah Dibayar (Membayar)	Pendaftaran Tidak Dapat Dilakukan	Rp. 550.000
7	PN BTA-0712022W04 27 November 2023	Sudah Dibayar (Membayar)	Perkara Tertarik	Rp. 300.000
8	PN BTA-0812022W1D 28 November 2023	Sudah Dibayar (Membayar)	Perkara Tertarik	Rp. 500.000
9	PN BTA-0412022W1R 14 November 2023	Sudah Dibayar (Membayar)	Perkara Tertarik	Adanya Windows Rp. 807.000
10	PN BTA-0412022W05	Sudah Dibayar	Perkara Tertarik	Rp. 307.000

BAB V

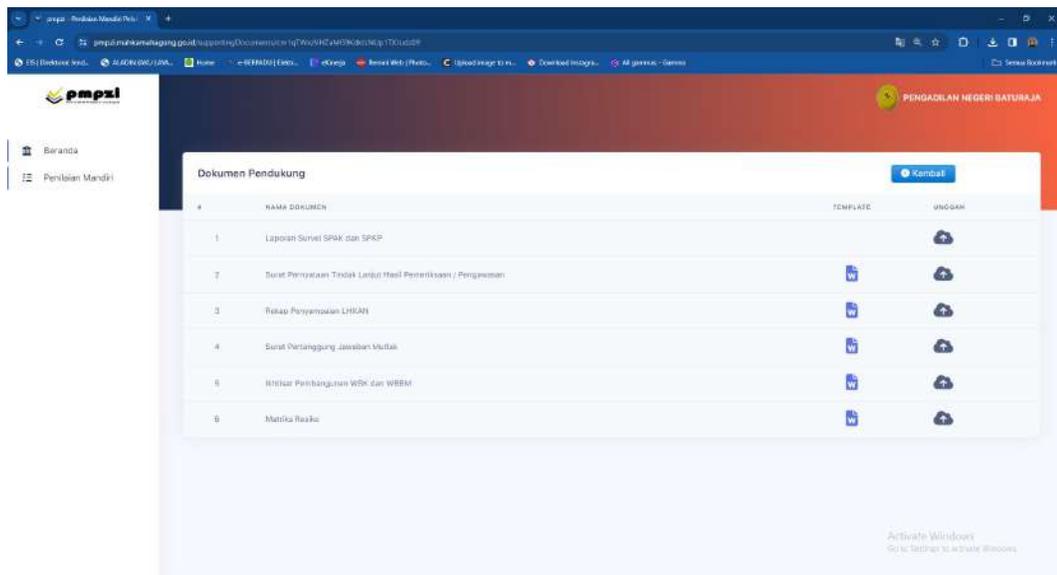
PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK

A. PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Pengadilan Negeri Baturaja berkomitmen untuk melanjutkan penerapan kerja untuk membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) tahun 2023. Komitmen tersebut diwujudkan dalam keseriusan seluruh Pimpinan, Hakim, Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Honorer yang dituangkan dalam komitmen dan ikrar bersama untuk melaksanakan Zona Integritas menuju WBK yang diadakan pada tanggal 09 Januari 2023. Keseriusan Pembangunan ZI WBK dengan membentuk Tim Kerja Pembangunan ZI menuju WBK di Lingkungan Pengadilan Negeri Baturaja tahun 2023 melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor W6.U4/66/KP.04.6/1/2023.

#	NOMOR	FREKUENSI TAHUN	LEMA PROSES	NILAI	STATUS	DOKUMEN	CATATAN
1	3-WBK-74-2023 Keputusan Pembinaan WBK	WBK/2023	Mulai: 27 Maret 2022 Selesai: -	98,78	Evaluasi Selesai	Link Laporan Sistem Pengukuran Dokumen Pendukung	
2	3-WBK-74-2022 Lampiran RUPK2 WBK Tahun 2022-24 Baturaja	WBK/2022	Mulai: 07 April 2022 Selesai: -	94,28	Evaluasi Selesai	Link Laporan Sistem Pengukuran Dokumen Pendukung	
3	1-WBK-74-2021 Keputusan Pembinaan WBK Jawa	WBK/2021	Mulai: 25 Maret 2021 Selesai: -	0,00	Pembinaan TPT Selesai	Link Laporan	

4	URAIAN	YA	TIDAK	EVIDENCE	EVIDENCE PENDUKUNG	CATATAN PEMBETULAN	INDIKATOR EVALUASI RAWAK	CATATAN EVALUASI RAWAK	STATUS
1	Persentase penyelesaian tidak terbagi hasil pengukuran dan ANEVBK 100%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		-	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
2	Terdapat kepatuhan penyediaan Laporan Kerja Kesyukuran Aparatur Sipil Negara (LAKKSN) melalui aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPAP) bagi pegawai yang tidak WBK LKRN 100%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		-	Tambahan Daftar Nama-Nama Wajib Laporan yang telah dilaksanakan LKRN Tahun 2022 yang telah ditandatangani KPN Baturaja, sehingga terdapat persentase tingkat kepatuhannya adalah sudah 100% atau lebih.	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
3	Terdapat kepatuhan penyediaan Laporan Kerja Kesyukuran Aparatur Sipil Negara (LAKKSN) melalui aplikasi Sistem Informasi Pelayanan Publik (SIPAP) bagi pegawai yang tidak WBK LKRN 100%	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		-	Tambahan Daftar Nama-Nama Wajib Laporan dari JN Baturaja yang telah dilaksanakan LAKKSN Tahun 2022 yang telah ditandatangani KPN Baturaja, sehingga terdapat persentase tingkat kepatuhannya.	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
4	Salah melakukan pembentangan ZI menuju WBK dari sisi WBK minimal 1 orang tahun	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		-	Tambahan SK Tim Pengembangan Zona Integritas	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>
5	Prosedur SAKP dan model internal minimal "B" untuk satuan yang diwujudkan WBK dan Prosedur SAKP dan model internal minimal "B" untuk satuan yang akan diwujudkan WBK	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>		-	-	-	-	<input checked="" type="checkbox"/>



Adapun tugas dari tim kerja pembangunan ZI-WBK adalah sebagai berikut:

- a. Menyusun rencana kerja Pembangunan Zona Integritas dengan memprioritaskan pada target tujuan pembangunan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani;
- b. Memberikan dukungan pada masing-masing unit pelayanan untuk mewujudkan wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan Pengadilan Negeri Baturaja;
- c. Membangun koordinasi, fasilitas, monitoring, evaluasi Pengawasan yang efektif untuk mempercepat Pembangunan Zona Integritas di lingkungan Pengadilan Negeri Baturaja;

Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Baturaja.

Dalam membangun ZI menuju WBK, Pengadilan Negeri Baturaja terus berupaya melalui berbagai program inovasi untuk secara maksimal mewujudkan kemudahan pelayanan kepada para pencari keadilan sesuai dengan prinsip sederhana, cepat, dan biaya ringan, dengan slogan: 5S Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun melalui Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dengan motto Pengadilan Negeri Baturaja MANTAP (Melayani, Asri, Nyaman, Transparansi, Akuntabel, Profesional). Elemen pembangunan ZI menuju WBK di Lingkungan Pengadilan Negeri Baturaja antara lain:

- a. Membangun Karakter dan Budaya Kerja
 - Menjadikan Ketua dan salah satu Hakim menjadi role model, yang memberikan contoh perubahan budaya kerja yang baik di lingkungan Pengadilan Negeri Baturaja serta menciptakan birokrasi yang bersih dari KKN.
 - Komitmen dan ikrar bersama mulai dari pimpinan, hakim, ASN dan Honorer untuk melakukan perubahan, perbaikan diri sendiri, meningkatkan pelayanan dan budaya kerja.

- Merubah *mindset* yang dahulu sebagai aparaturnya yang perlu dilayani menjadi aparaturnya yang memberikan pelayanan prima yang MANTAP.
- Melakukan pemilihan Agen Perubahan yang dilaksanakan setiap tahun dalam rangka membangun kinerja dan memotivasi Pegawai agar dapat berkinerja lebih baik. Agen Perubahan dipilih dalam 2 kategori yaitu dari ASN dan Honorer dengan melihat dari segi disiplin, integritas dan profesionalisme.
- Meningkatkan kompetensi Hakim dan ASN dengan mengikutsertakan Pegawai pada bimbingan teknis ataupun program peningkatan Sumber Daya Manusia baik yang diselenggarakan Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan instansi lainnya.
- Membekali seluruh Pegawai dengan SOP Pelayanan dan memastikan pelayanan sesuai dengan SOP.
- Memberikan pelayanan prima dengan ikhlas dan tuntas serta budaya 5S Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun dengan motto Pengadilan Negeri Baturaja MANTAP (Melayani, Asri, Nyaman, Transparansi, Akuntabel, Profesional).

b. Membuat Inovasi Pelayanan

- Senantiasa menciptakan inovasi dalam memberikan pelayanan antara lain Podcast untuk memberikan inovasi layanan-layanan yang ada di Pengadilan Negeri Baturaja, Kartu Prioritas (KATAS), Aplikasi Vidlabel (Video Layanan Difabel), Audio Brosur, Posbakum Online, Aplikasi SANDRA (*Smart Assitant Data Perkara*), Aplikasi SISGRA (Sistem Informasi Statistik Data Perkara), Aplikasi Antrian PTSP, dan Aplikasi Antrian Kesiapan Pelaksanaan Persidangan.
- Selalu memperbaiki serta meningkatkan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan public seperti menambahkan pelayanan bagi penyandang disabilitas (brosur yang dapat didengar (Audio Brosur), aplikasi berisi video informasi layanan dilengkapi dengan bahasa isyarat (Vidlabel), parkir khusus, *guide block*, antrian prioritas, tempat duduk khusus, alat bantu kursi roda, alat bantu tongkat, alat bantu dengar, kaca pembesar, brosur braille, dan toilet khusus), pembaharuan *website*, *update* kegiatan dan layanan pada Sosial Media Pengadilan Negeri Baturaja seperti Facebook, Instagram, Youtube dan Tiktok.
- Semua pencari keadilan yang ada dan terlayani secara maksimal di Ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Hal inilah yang menjadi kunci penting dalam upaya untuk membangun Zona Integritas menuju WBK.

c. Meningkatkan Pengawasan dan Monitoring

- Pelaksanaan apel pagi dan sore secara rutin, melakukan sidak (pemeriksaan mendadak), *coffee morning*.
- Pengawasan internal oleh Hakim Pengawas Bidang, baik teknis, maupun Kesekretariatan serta Pelayanan Publik (PTSP).
- Pemasangan CCTV untuk memantau aktivitas pelayanan dan keamanan, oleh Ketua Pengadilan Negeri Baturaja.
- Ruang tamu terbuka yang berfungsi untuk menerima tamu secara transparan di ruang yang telah disediakan sehingga pegawai tidak bisa bertemu dengan tamu untuk urusan perkara.
- Penerapan Akreditasi Sistem Manajemen Mutu yang setiap tahunnya diaudit oleh Pengadilan Tinggi Palembang, menjadikan Pengadilan Negeri Baturaja telah bekerja dengan baik sesuai dengan standar yang telah disyaratkan dalam akreditasi baik dari sisi pelayanan, kebersihan dan administrasi.

d. Publikasi dan Keterbukaan Informasi

- Meningkatkan pemanfaatan media sosial untuk memberikan informasi kepada publik terkait kegiatan, pelayanan maupun pemberitahuan. Media Sosial Pengadilan Negeri Baturaja antara lain Instagram, Facebook, Youtube, dan Tiktok.
- Mengupdate Website Pengadilan Negeri Baturaja www.pn-baturaja.go.id secara berkala dalam memberikan keterbukaan informasi.
- Melakukan Survey Kepuasan Masyarakat secara rutin untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan serta perbaikan terhadap pelayanan yang masih kurang.
- Publikasi biaya panjar perkara, biaya radius dan informasi jangka waktu pelayanan pada TV informasi
- Publikasi penyelesaian perkara pada website sipp.pn-baturaja.go.id

Dalam mewujudkan elemen-elemen pembangunan ZI menuju WBK di lingkungan Pengadilan Negeri Baturaja, maka diperlukan upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan publik serta pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan melalui program dan inovasi yang mencakup 6 Area perubahan.

Penerapan Zona Integritas menuju WBK ini adalah salah satu formulasi yang tepat untuk dapat memberikan pelayanan yang terbaik dan meningkatkan wibawa serta citra pengadilan, dengan adanya pencanangan Zona Integritas menuju WBK yang diiringi keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi Pengadilan secara sungguh-sungguh dan konsekuensi tentunya akan mampu menghadirkan insan aparatur Pengadilan Negeri Baturaja yang handal dan profesional dalam menegakan supremasi hukum.

1. MANAJEMEN PERUBAHAN

Area pertama dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) adalah Manajemen Perubahan. Manajemen Perubahan ini bertujuan mengubah secara sistematis dan konsisten mekanisme kerja, pola pikir serta budaya kerja individu di lingkungan Pengadilan Negeri Baturaja.

Target program manajemen perubahan adalah meningkatkan komitmen seluruh pegawai Pengadilan Negeri Baturaja dalam membangun Zona Integritas menuju WBK, terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja menjadikan semakin baiknya pelayanan kepada masyarakat.

Langkah yang telah diambil dalam membangun Zona Integritas menuju WBK adalah menyusun rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK. Penetapan rencana tersebut sebagai acuan serta memberikan kesinergian pemahaman dan program bagi Pengadilan Negeri Baturaja. Dalam memenuhi target yang telah ditetapkan, maka pada area ini dilakukan kegiatan sebagai berikut:

- a. Pembentukan Tim Kerja Pembangunan ZI-WBK
- b. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan ZI-WBK
- c. Pemantauan dan Evaluasi
- d. Perubahan Budaya kerja dan Pola Pikir

2. PENATAAN TATALAKSANA

Area kedua dalam Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) adalah Penataan Tatalaksana. Penataan Tatalaksana ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas sistem, proses dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur.

Target program penataan tatalaksana adalah penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintah, dan meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen pemerintahan pada pembangunan ZI Menuju WBK. Penataan Tatalaksana di lingkungan Pengadilan Negeri Baturaja bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada ZI Menuju WBK. Dalam hal ini target utama yang ingin dicapai adalah meningkatnya kinerja yang sesuai dengan prinsip efisiensi, efektifitas, dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan di ZI Menuju WBK, antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi.

Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa indikator yang telah dilakukan dalam upayanya untuk meningkatkan pelayanan publik dengan menerapkan Penataan Tatalaksana di Pengadilan Negeri Baturaja, utamanya melalui penetapan,

pelaksanaan, dan evaluasi secara berkala terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) Kegiatan Utama yang mengacu pada proses bisnis Pengadilan Negeri.

Guna memenuhi target tersebut, maka telah dilaksanakan kegiatan sebagai berikut:

- a. SOP Kegiatan Utama
- b. Penerapan E-Office dan Keterbukaan informasi publik

3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

Target program penataan sistem manajemen SDM adalah meningkatkan ketaatan terhadap pengelola SDM Aparatur, transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM Aparatur, disiplin SDM Aparatur, efektifitas manajemen SDM Aparatur, dan profesionalisme SDM Aparatur pada masing-masing area perubahan pada program pembangunan ZI Menuju WBK.

Penataan manajemen SDM bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme pegawai Pengadilan Negeri Baturaja dalam rangka pembangunan Zona Integritas Menuju WBK. Secara khusus penataan sistem manajemen kepegawaian Pengadilan Negeri Baturaja ditujukan untuk menciptakan pegawai yang berintegritas, kompeten, *capable*, profesional, dan berkinerja tinggi sehingga dapat memberikan dampak positif bagi kinerja organisasi. Langkah- langkah perencanaan pegawai dilakukan dengan analisis jabatan dan beban kerja, pengisian posisi pegawai sesuai dengan kebutuhan dan anggaran, serta pelatihan ketrampilan secara berkala bagi pegawai sesuai dengan ketersediaan posisi dan kebutuhan pegawai.

Manajemen SDM Pengadilan Negeri Baturaja juga dilaksanakan melalui pemantauan terhadap kelengkapan data kepegawaian Pengadilan Negeri Baturaja dalam website sikep.mahkamahagung.go.id.

- a. Perencanaan kebutuhan pegawai telah disusun berdasarkan analisis beban kerja
- b. Pola mutasi internal
- c. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi
- d. Penetapan Kinerja Individu
- e. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai
- f. Sistem Informasi Kepegawaian

4. PENGUATAN AKUNTABILITAS

Perbaikan dan penguatan sistem manajemen pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan agenda penting dalam reformasi birokrasi di Pengadilan Negeri Baturaja dengan fokus utama pada upaya peningkatan akuntabilitas dan peningkatan capaian kinerja yang berorientasi pada hasil (*outcome*).

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban Pengadilan Negeri Baturaja untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pengelolaan sumber

daya dan pelaksanaan kebijakan program serta kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan yang telah ditetapkan dan dipertanggung-jawabkan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja (LKJiP) yang disusun secara periodik. Untuk mendukung penguatan akuntabilitas kinerja, Pengadilan Negeri Baturaja telah menetapkan Sasaran Strategis dan Indikator Kinerja Utama melalui Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor W6-U4/674/KP.04.6/XII/2022.

Penguatan Akuntabilitas Kinerja ditujukan untuk memastikan terbentuknya pemerintahan yang baik dan terpercaya di Pengadilan Negeri Baturaja sehingga mampu mencapai target program penguatan akuntabilitas kinerja yaitu meningkatkan kinerja pada Pengadilan Negeri Baturaja dan akuntabilitas instansi pemerintah.

- a. Keterlibatan Pimpinan dan Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
- b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja

5. PENGUATAN PENGAWASAN

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan meningkatkan kualitas pengawasan dan penilaian pada penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada Pengadilan Negeri Baturaja. Target yang ingin dicapai adalah:

1. Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara
2. Meningkatnya efektivitas pengelolaan keuangan negara
3. Status Opini WBK BPK terhadap pengelolaan keuangan Negara tetap bertahan
4. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang

Capaian untuk mengukur pencapaiannya pengendalian gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, WBS, penanganan benturan kepentingan. Pembangunan ZI Pengadilan Negeri Baturaja dalam hal penguatan pengawasan antara lain dengan beberapa kegiatan berikut ini:

- a. Pengendalian gratifikasi
- b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)
- c. Pengaduan Masyarakat dan Whistle Blowing System
- d. Penanganan Benturan Kepentingan

6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan upaya untuk meningkatkan mutu dan inovasi pelayanan publik di lingkungan Pengadilan Negeri Baturaja secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat di wilayah kerja. Disamping itu peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik.

Target yang ingin dicapai melalui program ini adalah meningkatnya kualitas pelayanan publik yang mudah, murah, cepat, dan aman sehingga dapat memberikan pengaruh positif terhadap indeks kepuasan masyarakat bagi penyelenggaraan pelayanan publik yang di Pengadilan Negeri Baturaja. Atas dasar tersebut, maka terdapat beberapa kegiatan prioritas yang perlu dilakukan untuk menerapkan peningkatan kualitas pelayanan publik yaitu:

- a. Standar pelayanan
- b. Budaya pelayanan prima
- c. Program Unggulan di Pengadilan Negeri Baturaja
- d. Fasilitas pelayanan publik di Pengadilan Negeri Baturaja

B. PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)

Pelayanan dalam Pemerintahan di Negara Republik Indonesia terus semakin diperbaiki dan dipermudah untuk kita. Salah satunya di Pengadilan Negeri Baturaja dimana Pengadilan Negeri Baturaja telah melakukan upaya penyederhanaan layanan dengan menerapkan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP). Pada tahun 2023, total pelayanan PTSP Pengadilan Negeri Baturaja sebanyak 19.847 pelayanan.

Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Pengadilan Negeri Baturaja diharapkan dapat melayani Masyarakat dengan lebih baik dan lebih mudah dari sebelumnya, melayani Masyarakat dengan lebih cepat, lebih ramah, bebas pungli, lebih transparan, dan lebih jelas dari persyaratan, biaya dan waktunya.

No	Bulan	PELAYANAN PTSP						Total Pelayanan / Bulan
		Pelayanan Keaniteraan Hukum	Pelayanan Keaniteraan Pidana	Pelayanan Keaniteraan Perdata	Pelayanan Umum	Pelayanan Informasi dan Pengaduan	Pelayanan Posbakum	
1.	Januari	151	146	152	338	12	8	807
2.	Februari	512	210	95	262	10	7	1096
3.	Maret	283	595	207	213	18	6	1322
4.	April	113	382	62	120	6	3	686
5.	Mei	1924	722	112	184	34	15	2991
6.	Juni	241	781	73	122	46	12	1275
7.	Juli	238	1173	167	214	19	16	1827
8.	Agustus	76	1008	109	268	26	18	1505
9.	September	308	1462	148	187	23	14	2142
10.	Oktober	210	1731	101	168	90	19	2319
11.	November	84	1205	100	184	46	12	1631
12.	Desember	84	1731	182	214	25	10	2246
Total		4224	11146	1508	2474	355	140	19847

Beberapa layanan PTSP yang ada di Pengadilan Negeri Baturaja meliputi:

- Pintu masuk Pengadilan Negeri Baturaja yang dijaga oleh Petugas Pengadilan Negeri Baturaja.



- Setiap harinya PTSP PN Baturaja kelas IB selalu didampingi oleh Supervisor yang kompeten dalam menjalankan tugasnya.



- Duta Pelayanan mengarahkan dan membantu Pencari Keadilan dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan.



- Meja Informasi sebagai bentuk komitmen keterbukaan informasi publik dan peningkatan pelayanan publik pengadilan



- Loket pelayanan Kepaniteraan Pidana seperti pelayanan pendaftaran perkara pidana, izin pengeledahan, izin penyitaan serta pelayanan produk hukum Kepaniteraan Pidana lainnya.



- Loket pelayanan Kepaniteraan Perdata seperti pelayanan pendaftaran perkara perdata permohonan, gugatan, gugatan sederhana dan pelayanan produk hukum Kepaniteraan Perdata lainnya.



- Loker pelayanan Kepaniteraan Hukum seperti pelayanan pembuatan surat keterangan melalui Eraterang, legalisasi Badan Hukum, pendaftaran surat kuasa dan pelayanan Kepaniteraan Hukum lainnya.



- Loker pelayanan Umum seperti pelayanan surat masuk dan surat keluar.



- Loker pelayanan meja informasi untuk pengambilan nomor antrian PTSP serta pendaftaran Pengunjung PTSP pada aplikasi buku tamu PTSP.



- Pojok e-Court digunakan untuk melayani pendaftaran perkara e-Court, pendaftaran Pengguna Lain serta pelayanan e-Court dan e-Litigasi lainnya.



- Meja Inzage untuk pemeriksaan berkas dari pemohon dan terdapat kasir perdata.



- Meja Posbakum yang ditempati oleh Petugas Lembaga Bantuan untuk kepentingan hukum Penerima Bantuan Hukum.



- Ruang Tunggu difabel yang dilengkapi dengan Toilet Umum, Kursi Roda, Tongkat, Brosur layanan dengan Huruf Braille



- Ruang tamu pengunjung yang bisa digunakan apabila Pencari keadilan ingin bertemu untuk kegiatan tertentu.



- Ruang tunggu Pengunjung Pengadilan Negeri Baturaja.



- Souvenir yang diberikan kepada Pencari keadilan jika terjadi keterlambatan oleh petugas PTSP sebagai bentuk kompensasi.



- Pengadilan Negeri Baturaja kelas IB menyediakan komputer guna untuk pelayanan PTSP seperti e-Court, e-Litigasi, Eraterang, e-Litigasi dan lainnya.



- Audio Brosur yang digunakan untuk Pencari Keadilan untuk mempermudah dalam mendapatkan informasi yang dibutuhkan.



- Kumpulan Brosur yang memuat informasi layanan yang tersedia di Pengadilan Negeri Baturaja.



- TV yang menunjukkan informasi seputar Pengadilan Negeri Baturaja.



- Kotak saran untuk mengumpulkan keluhan, kritik, atau saran pada Pengadilan Negeri Baturaja dari masyarakat.



- Barcode informasi dan tata cara penggunaan Posbakum Online



- Barcode informasi Aplikasi Susanti (Suasana Santun Melayani dengan Sepenuh Hati)



C. INOVASI PELAYANAN PUBLIK

Untuk mendukung pelaksanaan kegiatan pelayanan public di Pengadilan Negeri Baturaja, maka Pengadilan Negeri Baturaja telah mengembangkan beberapa aplikasi untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses informasi yang ada di Pengadilan Negeri Baturaja serta mendukung fasilitas teknologi informasi di PTSP. Beberapa inovasi pelayanan publik yang ada di Pengadilan Negeri Baturaja diantaranya:

- Aplikasi SANDRA (*Smart Asisten Data Perkara*)

Sandra Virtual Asisten / Robot Penjawab Otomatis melalui layanan Telegram dimana Aplikasi ini beroperasi selama 1 X 24 Jam setiap hari dan diprogram untuk melayani masyarakat pencari keadilan dengan fungsi menggantikan operator pelayanan untuk menjawab secara otomatis permintaan informasi yang ditanyakan oleh masyarakat, sehingga meskipun diluar jam kerja masyarakat tanpa kesulitan mendapatkan informasi dengan mudah, cepat, murah dan praktis. Bagi yang menggunakan *smartphone* harus terlebih dahulu mengisntal Telegram pada Playstore (Android) / iOS Store (Apple). Setelah itu dapat membuka Aplikasi Telegram dan mencar layanan Pengadilan Negeri Baturaja dan pada tombol pencarian / *search* ketikkan kata kunci pnbaturaja / @pnbaturaja_bot.

VIRTUAL BOT [HTTPS://T.ME/PNBATURAJA_BOT](https://t.me/pnbaturaja_bot)

SANDRA (SMART ASISTEN DATA PERKARA)
Asisten Virtual Yang Dapat Membantu Masyarakat Untuk Dapat Mengakses Informasi Perkara, Jadwal Sidang, Biaya Perkara, E-Court, ERATERANG dan Layanan Pengadilan Negeri Baturaja Lainnya Melalui Layanan **TELEGRAM**

SCAN ME

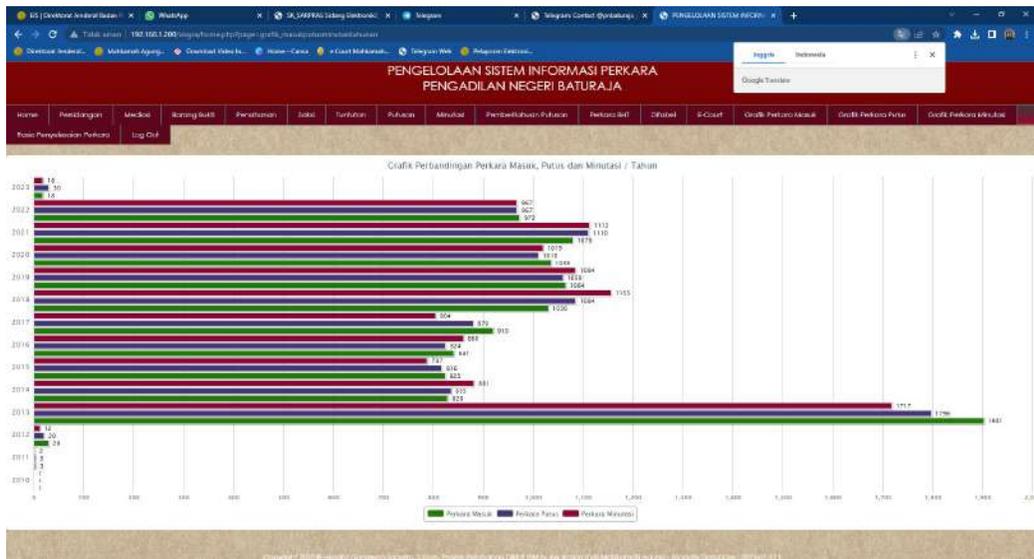
VIA TELEGRAM

SIAP MELAYANI MASYARAKAT !

Bagi Yang Menggunakan Smartphone Harus Terlebih Dahulu Mengisntal Telegram Pada Playstore (Android) / IOS Store (Apple) Setelah Itu Dapat Membuka Aplikasi Telegram dan Mencari Layanan PN Baturaja dan pada tombol pencarian / *search* ketikkan kata kunci **pn baturaja / @pnbaturaja_bot**

- Aplikasi SISGRA (Sistem Informasi Statistik Grafik Data Perkara)

Aplikasi SISGRA merupakan aplikasi yang menampilkan data statistik perkara dalam bentuk grafik baik itu grafik perkara masuk, perkara putus, maupun perkara yang diminutasi, serta mempermudah Pimpinan untuk mengecek akurasi data perkara yang diinput pada aplikasi SIPP.



- Aplikasi ANTRIAN PTSP (Aplikasi Antrian PTSP)

Aplikasi ini digunakan dan ditempatkan di ruang PTSP Pengadilan Negeri Baturaja dimana Pengunjung yang datang akan mendapatkan nomor antrian sesuai dengan masing-masing keperluannya, loket pelayanan yang tersedia pada aplikasi ini yakni loket pelayanan pidana, hukum, perdata dan loket pelayanan umum. Pengunjung akan dipanggil berdasarkan nomor antrian, sehingga antrian pelayanan menjadi lebih tertib.

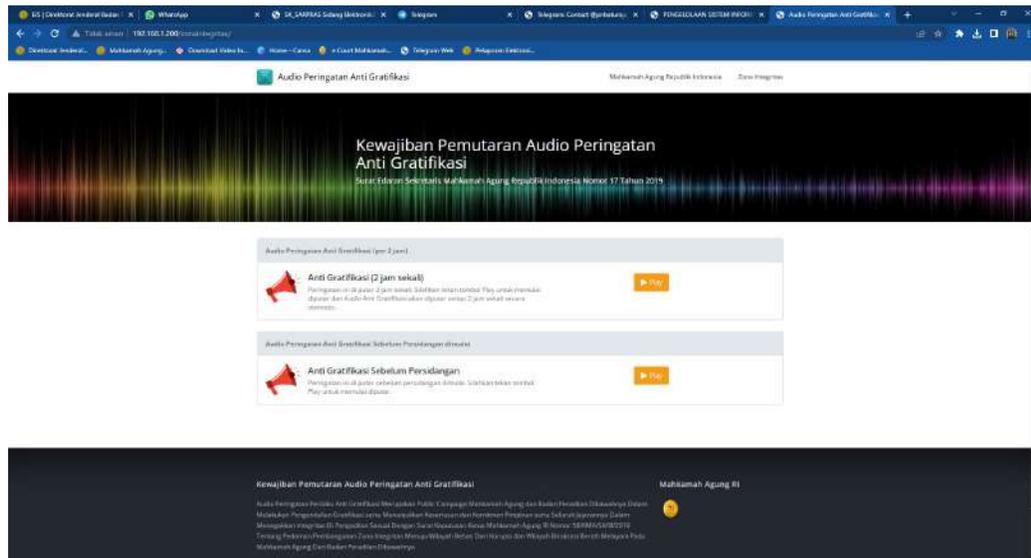


Aplikasi ini digunakan dan ditempatkan di ruang ptsp pengadilan negeri baturaja dimana pengunjung yang datang akan mendapatkan nomor antrian sesuai dengan masing masing keperluannya, loket pelayanan yang tersedia pada aplikasi ini yakni loket pelayanan pidana, hukum, perdata dan loket pelayanan umum. Pengunjung akan dipanggil berdasarkan nomor antrian sehingga antrian pelayanan menjadi lebih tertib

- Aplikasi Audio Anti Gratifikasi

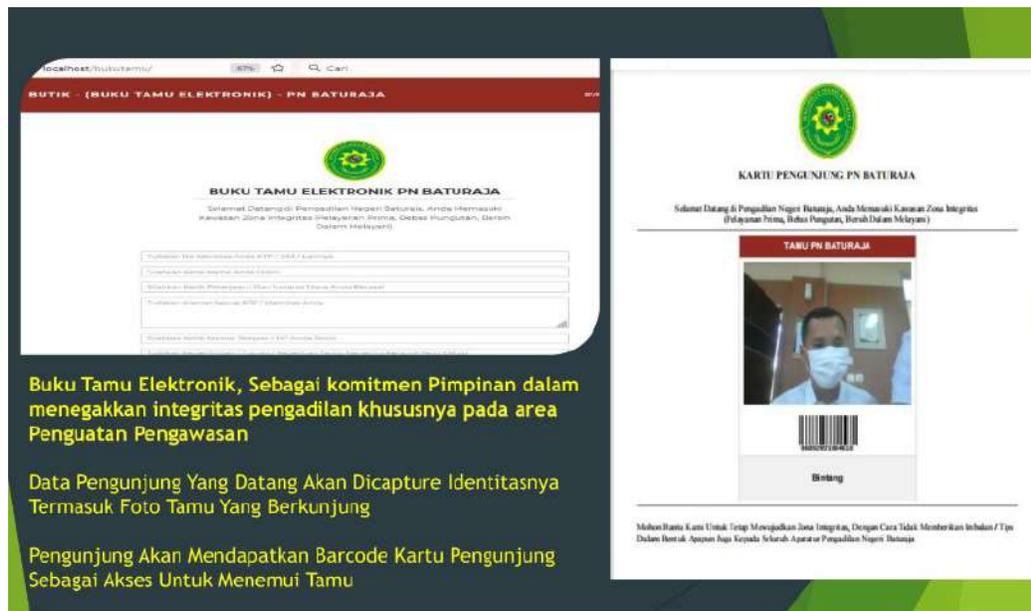
Aplikasi ini merupakan *public campaign* Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya dalam melakukan pengendalian gratifikasi serta menunjukkan keseriusan dan komitmen Pimpinan serta Seluruh Jajarannya dalam menegakkan integritas di Pengadilan sesuai dengan surat keputusan Ketua Mahkamah Agung RI

Nomor: 58/KMA/SK/III/2019 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di bawahnya.



- Aplikasi BUTIK (Buku Tamu Elektronik)

Aplikasi ini adalah Aplikasi Buku Tamu Elektronik yang terintegrasi dengan Telegram untuk mendata tamu yang masuk kedalam Pengadilan Negeri Baturaja, Aplikasi ini akan mengirimkan notifikasi berupa informasi identitas tamu, tanggal dan waktu tersebut. Aplikasi ini diharapkan dapat membantu dalam mencegah gratifikasi pada Pengadilan Negeri Baturaja.



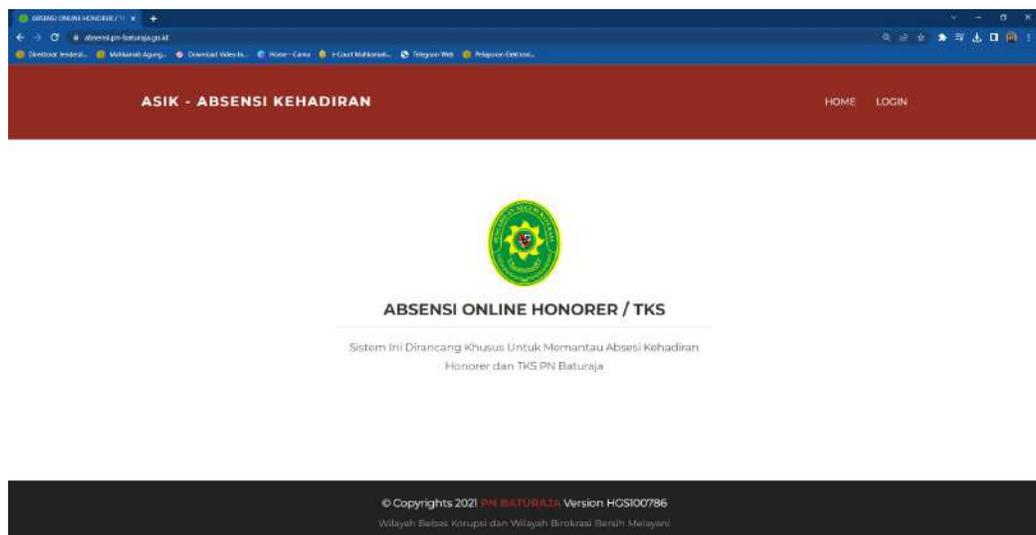
- Aplikasi Antrian Sidang

Aplikasi Antrian Sidang adalah Aplikasi yang terintegrasi dengan data persidangan harian dari SIPP dan mampu menampilkan status kehadiran pihak secara *real time* karena Aplikasi Antrian Sidang terhubung langsung dengan *Database* SIPP Pengadilan Negeri Baturaja dan terkoneksi dengan Bot Telegram yang akan memberikan informasi kepada Hakim atau Panitera Pengganti sesuai dengan jadwal persidangan.



- Aplikasi ASIK

Aplikasi ASIK (*Absensi Online Honor/TKS* Pengadilan Negeri Baturaja) adalah aplikasi yang akan *capture* gambar Honorer/ TKS serta memberikan informasi tanggal dan waktu kehadiran secara *real time* dan akan terkirim langsung ke Telegram Pimpinan, bagian Kepegawaian dan Honorer/TKS tersebut sebagai eviden kehadiran.



- Podcast

Podcast pada Pengadilan Negeri Baturaja merupakan salah satu bentuk pelayanan publik untuk memberikan informasi mengenai layanan-layanan yang ada pada Pengadilan Negeri Baturaja dari narasumber-narasumber yang menguasai bidangnya.



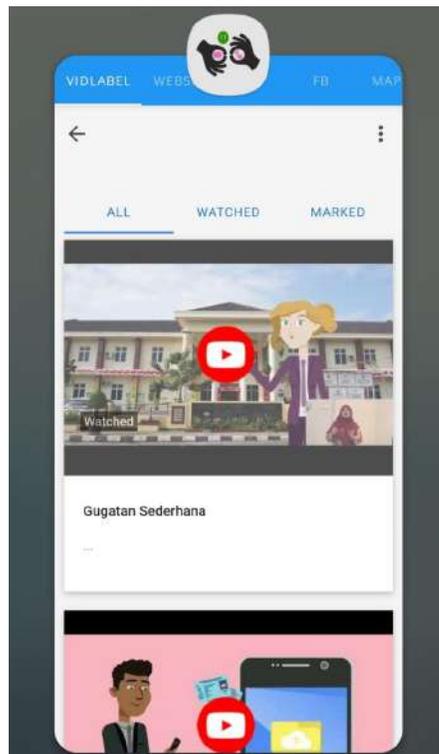
- KATAS (Kartu Antrian Prioritas)

Kartu Prioritas (KATAS) adalah kartu yang dikenakan pengunjung/pengguna layanan yang tergolong kelompok rentan, antaranya: disabilitas, lansia (dengan rentan usia lebih kurang 60 tahun), wanita hamil, ibu menyusui, anak/pengunjung sakit di Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B yang berguna untuk pengecualian antrian dan mendapat perlakuan lebih berkenaan dengan kekhususannya.



- Vidlabel (Video Layanan Difabel)

Aplikasi Vidlabel (Video Layanan Difabel) merupakan aplikasi layanan yang berisi video-video penjelasan layanan yang ada di Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B yang dilengkapi dengan bahasa isyarat oleh juru bahasa isyarat di setiap penjelasan videonya. Selain itu, terdapat menu website, facebook, instagram, dan maps Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B pada aplikasi tersebut.



- Audio Brosur

Audio Brosur berisi data informasi layanan di Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B dalam bentuk tulisan dan suara (audio) yang memudahkan calon pengguna layanan dalam mengakses informasi mengenai syarat-syarat dalam mengajukan layanan di Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B.



- Posbakum Online

Posbakum Online merupakan salah satu inovasi dari layanan Pos Bantuan Hukum Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B yang diberlakukan mulai tanggal 4 November 2022. Pengguna Layanan dapat berkonsultasi dengan Petugas Posbakum secara online di jadwal yang sudah ditentukan melalui Aplikasi *Zoom* dengan memasukkan *Meeting ID* dan *Password Zoom Meeting* yang diinfokan sebelumnya. Seiring perkembangannya, tepatnya mulai tanggal 12 April 2023, Posbakum Online kini sudah beralih ke aplikasi *Whatsapp* dengan didukung oleh aplikasi *Susanti* dan *Aladin*.



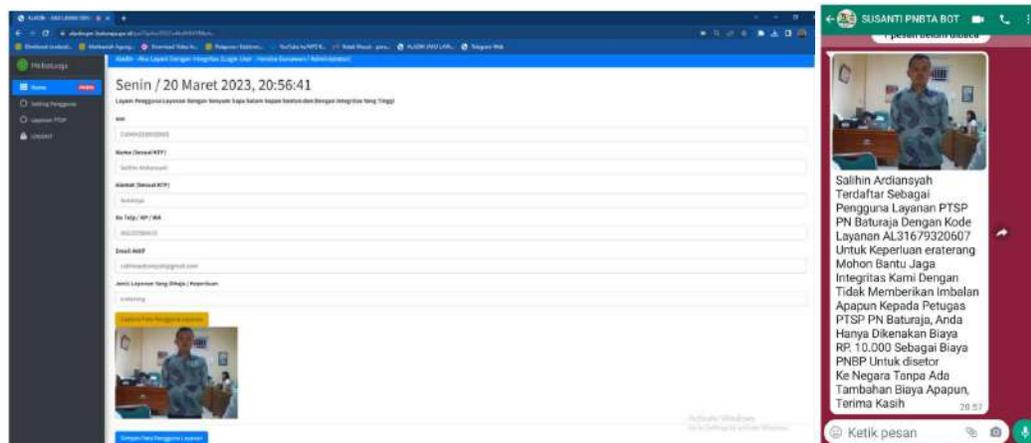
- Aplikasi Susanti (Suasana Santun Melayani dengan Sepenuh Hati)

Aplikasi ini merupakan bot Whatsapp yang dapat dijangkau oleh masyarakat melalui chat Whatsapp ke nomor 089687412111. Aplikasi ini bekerja secara otomatis selama 1 x 24 jam untuk menjawab pertanyaan dari masyarakat.



- Aplikasi Aladin (Aku Layani dengan Integritas) Berkolaborasi dengan Susanti

Aplikasi ini digunakan untuk mendata setiap pengguna layanan yang datang ke PTSP Pengadilan Negeri Baturaja Kelas IB. Pengguna layanan akan didata berdasarkan identitas seperti KTP atau SIM, kemudian data pengguna akan dicapture dan disimpan ke dalam database, kemudian pada saat yang sama yang bersangkutan, Pimpinan Pengadilan akan mendapatkan notifikasi via Whatsapp yang dikirimkan oleh aplikasi Susanti (kolaborasi).



BAB VI

PENGAWASAN

A. INTERNAL

Mengingat luas lingkup tugas dan berat beban pekerjaan yang harus dilaksanakan pengadilan, maka perlu adanya perhatian besar terhadap tata cara pelaksanaan pengelolaan administrasi pengadilan. Pengawasan penting dan mutlak dilakukan untuk mengetahui apakah proses yang sedang berlangsung sudah sesuai dengan rencana, dengan hasil akhir dan dari segi efisiensi.

Dalam melaksanakan pengawasan ini Ketua Pengadilan Negeri Baturaja menunjuk Hakim untuk melaksanakan pengawasan di setiap bidang kerja, yaitu dengan mengeluarkan Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Nomor: W6-U4/238/KP.04.6/VI/2023 Tanggal 14 Juni 2023 tentang Penunjukkan Koordinator Pengawasan dan Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Baturaja Kelas IB sebagai berikut :

No.	Bidang Pengawas	Nama	Bidang Tugas
1.	Koordinator Pengawas	Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H. NIP. 198007022005021001	Pengawasan Internal
2.	Perdata	Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H. NIP. 199404062017121002	1. Gugatan 2. Gugatan Sederhana 3. Upaya Hukum 4. Register/SIPP 5. Relas 6. Keuangan Perkara 7. Mediasi 8. Eksekusi 9. Minutasi 10. Direktori Putusan 11. Delegasi/SIPP 12. Jurusita/Jurusita Pengganti

3.	Pidana	Fega Uktolseja, S.H., M.H. NIP. 198905082017121001	<ol style="list-style-type: none"> 1. Register Biasa/SIPP 2. Upaya Hukum 3. Relas Pidana 4. Register Anak/SIPP 5. Diversi 6. Penahanan/Geledah/ Izin Sita 7. Minutasi 8. Direktori Putusan
			Hakim Wasmat
4.	Hukum	I Made Gede Kariana, S.H. NIP. 198411222011011003	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arsip Perkara 2. Laporan Perkara 3. Bantuan Hukum 4. Riset 5. Informasi/Pengaduan 6. Kepuasan Pelanggan 7. Survey
5.	Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana	Yessi Oktarina, S.H. NIP. 199205212017122003	<ol style="list-style-type: none"> 1. SKP 2. Penegakan Disiplin 3. Absensi 4. Kenaikan Pangkat 5. KGB, Cuti, Izin dll 6. Pelatihan
6.	Sub Bagian Perencanaan, TI & Pelaporan	Salihin Ardiansyah, S.H., M.H. NIP. 199208212017121004	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan/Revisi Program dan Anggaran 2. Evaluasi dan Pelaporan
7.	Sub Bagian Umum & Keuangan	M. Fahri Ikhsan, S.H. NIP. 198105072009041006 & Arie Septi Zahara, S.H. NIP. 199409032017122004	<ol style="list-style-type: none"> 1. DIPA 2. Realisasi Anggaran 3. Kebersihan 4. Keamanan 5. Taman 6. Inventaris BMN 7. Pemeliharaan Gedung 8. DBR

			9. Pengawas Honorar/TKS 10. Perpustakaan
8.	Hubungan Masyarakat & Juru Bicara	Ferdinaldo Hendrayul Bonodikun, S.H., M.H. NIP. 198007022005021001	Hubungan Masyarakat Juru Bicara
9.	Survey Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan	I Made Gede Kariana, S.H. NIP. 198411222011011003 & Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H. NIP. 199409162017121004 Alidin, S.H., M.H. NIP. 197102071993031004 Hariyansah, S.H., M.H. NIP. 198705202009121008 Hendra Gunawan Saputra, S.Kom NIP. 198607102009121001	1. SKM 2. IPK 3. Pelatihan
10.	Upaya Hukum dan Eksekusi	Fega Uktolseja, S.H., M.H. NIP. 198905082017121001 & Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H. NIP. 199409162017121004 Teddy Hendrawan Anggar Saputra, S.H. NIP. 199404062017121002	-
11.	Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)	Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H. NIP. 199409162017121004	-

(SK Hakim Pengawas Bidang Tahun 2023 Terlampir)

B. EVALUASI

Dalam rangka monitoring dan mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kendala yang dihadapi, setiap 1 (satu) bulan dilaksanakanlah Rapat Kerja Rutin, dan wajib dihadiri oleh para Hakim, Panitera dan Sekretaris, Panitera Pengganti, Juru Sita, Juru Sita Pengganti, Pejabat Fungsional dan Struktural serta seluruh Karyawan/Karyawati Pengadilan Negeri Baturaja. Dari hasil rapat kerja rutin tersebut, dibuat notulen rapat sebagai bahan evaluasi dari kegiatan yang telah dilaksanakan. ***(Terlampir)***

BAB VII

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Laporan Tahun 2023 Pengadilan Negeri Baturaja merupakan Laporan Pertanggung Jawaban Pengadilan Negeri Baturaja dalam 1 (satu) tahun terakhir sehingga dengan laporan ini hal-hal yang menjadi kekurangan dan kelemahan Pengadilan Negeri Baturaja dapat dievaluasi serta ditingkatkan pada tahun yang akan datang.

Dari uraian Laporan Tahun 2023 Pengadilan Negeri Baturaja tersebut di atas telah tergambar pelaksanaan tugas kami dalam penanganan manajemen perkara dan administrasi peradilan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sistem Pengawasan Struktural yang melekat telah dilaksanakan, baik oleh Hakim Pengawas dari Pengadilan Tinggi Palembang, para Hakim Pengawas Bidang dengan Koordinator Ketua Pengadilan Negeri Baturaja dan teman-temannya telah dilakukan perbaikan dengan pembenahan seperlunya.

B. REKOMENDASI

1. Bidang sumber daya manusia di Pengadilan Negeri Baturaja terdapat kekurangan pegawai Golongan II dan III sebagai pelaksana tata usaha dan staff kepaniteraan kurang lebih membutuhkan 10 orang pegawai agar pembagian tugas berdasarkan Tupoksi dapat terlaksana dengan baik. Untuk itu agar dilakukan penambahan pegawai untuk persiapan mengisi kekosongan tersebut.
2. Peingkatan sumber daya manusia dipandang perlu dilakukan melalui bimbingan teknis, pelatihan workshop, dan lain-lain. Bagi para Hakim, Panitera Pengganti, Juru Sita, Pejabat Fungsional dan Struktural baik ditingkat wilayah dan pusat.
3. Guna menunjang tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Baturaja dalam rangka menerma, memeriksa dan memutuskan perkara perlu di dukung sarana dan prasarana yang memadai di antaranya Pengadaan alat pengolah data bagi para Hakim dan Panitera Pengganti dalam rangka penyelesaian berkas perkara.

LAMPIRAN



PENGADILAN NEGERI BATURAJA KELAS I B

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN NEGERI BATURAJA KELAS I B

NOMOR : W6-U4/ 238/KP.04.6/I/2023

TENTANG

**PENUNJUKAN KOORDINATOR PENGAWASAN DAN PENGAWAS BIDANG
PADA PENGADILAN NEGERI BATURAJA KELAS I B**

KETUA PENGADILAN NEGERI BATURAJA KELAS I B

- Menimbang** :
- a. Bahwa dengan terbitnya Peraturan Mahkamah Agung R.I tanggal 7 Oktober 2015, Nomor 7 Tahun 2015, tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, terjadi perubahan dan penambahan nomenklatur, baik di bidang Kepaniteraan maupun di bidang Kesekretariatan;
 - b. Bahwa pengawasan adalah wewenang Ketua Pengadilan Negeri yang dapat didelegasikan kepada para Hakim ;
 - c. Bahwa mengingat luas cakupan tugas dan wewenang Ketua Pengadilan Negeri dalam bidang pengawasan seperti poin 2, untuk menjalankan pengawasan lebih efektif dan berdayaguna agar jalannya Peradilan, baik administrasi teknis maupun non teknis dapat berjalan sesuai yang diharapkan, maka perlu ditunjuk Koordinator Pengawasan dan Pengawasan Bidang ;
 - d. Bahwa nama –nama yang ditunjuk dalam daftar lampiran surat keputusan ini dipandang cakap dan mampu melaksanakan tugas pengawasan ;
 - e. Bahwa Laporan Hakim Pengawasan yang dilakukan regular setiap bulan, yang laporannya disampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri selaku Koordinator kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Banding ;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman ;
 2. Undang-Undang Nomor.49 tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang No. 8 tahun 2004, Undang-Undang No. 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum ;
 3. Buku IV tahun 1993, Buku II tahun 1997 dan edisi 2007 tahun 2009 tentang Tata Laksana Pengawasan di Pengadilan ;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **PENUNJUKKAN KOORDINATOR PENGAWASAN DAN PENGAWAS BIDANG PADA PENGADILAN NEGERI BATURAJA KELAS I B**
- Pertama : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B Nomor : W6-U4/101/KP.04.6/1/2022 tanggal 02 Juni 2023 tentang Penunjukkan Koordinator Pengawasan dan Pengawas Bidang pada Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B ;
- Kedua : Menunjuk nama-nama yang tersebut dalam Lampiran Surat Keputusan ini sebagai Koordinator Pengawasan / Pengawas Bidang di Pengadilan Negeri Baturaja ;
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan seperlunya ;
- Keempat : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan di : Baturaja
Pada Tanggal : 14 Juni 2023

KETUA,

HENDRI AGUSTIAN

Lampiran I:
Keputusan Ketua Pengadilan Negeri Baturaja
Kelas I B
Nomor : W6-U4/2023/KP.04.6/1/2023
Tanggal : 14 Juni 2023

Koordinator Pengawasan dan Pengawas Bidang Pengadilan Negeri Baturaja Kelas I B

No	Bidang Pengawas	Nama	Bidang Tugas
1	Koordinator Pengawas	Ferdinaldo Hendrayul B, S.H., M.H NIP. 19800702 200502 1 001	Pengawasan Internal
2	Perdata	Teddy Hendrawan Anggar S.S.H NIP. 19940406 201712 1 002	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gugatan 2. Gugatan Sederhana 3. Upaya Hukum 4. Register / SIPP 5. Relass 6. Keuangan Perkara 7. Mediasi 8. Eksekusi 9. Minutasi 10. Direktori Putusan 11. Delegasi / SIPP 12. Jurusita / Jurusita Pengganti
3	Pidana	Fega Uktolseja, S.H., M.H NIP. 19890508 201712 1 001	<ol style="list-style-type: none"> 1. Register Biasa / SIPP 2. Upaya Hukum 3. Relass Pidana 4. Register Anak / SIPP 5. Diversi 6. Penahanan / Geledah / Izin Sita 7. Minutasi 8. Direktori Putusan
4	Hukum	I Made Gede Kariana, S.H NIP. 19841122 201101 1 003	<ol style="list-style-type: none"> 1. Arsip Perkara 2. Laporan Perkara 3. Bantuan Hukum 4. Riset 5. Informasi / Pengaduan 6. Kepuasan Pelanggan 7. Survey
5	Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi & Tata Laksana	Yessi Oktarina, S.H NIP. 19920521 201712 2 003	<ol style="list-style-type: none"> 1. SKP 2. Penegakan Disiplin 3. Absensi 4. Kenaikan Pangkat 5. KGB, Cuti, Izin DII 6. Pelatihan
6	Sub Bagian Perencanaan, IT & Pelaporan	Salihin Ardiansyah, S.H. NIP. 19920821 201712 1 004	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perencanaan / Revisi Program dan Anggaran. 2. Evaluasi dan Pelaporan.

No	Bidang Pengawas	Nama	Bidang Tugas
7	Sub Bagian Umum & Keuangan	M. Fahri Ikhsan, S.H NIP. 19810507 200904 1 006 & Arie Septi Zahara, S.H NIP. 19940903 201712 2 004	1. DIPA 2. Realisasi Anggaran 3. Kebersihan 4. Keamanan 5. Taman 6. Inventaris BMN 7. Pemeliharaan Gedung 8. DBR 9. Pengawas Honorer / TKS 10. Perpustakaan
8	Hubungan Masyarakat & Juru Bicara	Ferdinaldo Hendrayul B, S.H., M.H NIP. 19800702 200502 1 001	Hubungan Masyarakat Juru Bicara
9	Survey Kepuasan Masyarakat dalam hal Pelayanan	I Made Gede Kariana, S.H NIP. 19841122 201101 1 003 & Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H NIP. 19940916 201712 1 004 Alidin, S.H., M.H NIP. 19710207 199303 1 004 Hariyansah, S.H., M.H NIP. 19870520 200912 1 008 Hendra Gunawan Saputra, S.Kom NIP. 19860710 200912 1 001	1. SKM 2. IPK 3. Pelatihan
10	Upaya Hukum dan Eksekusi	Fega Uktolseja, S.H., M.H NIP. 19890508 201712 1 001 & Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H NIP. 19940916 201712 1 004 Teddy Hendrawan Anggar S.S.H NIP. 19940406 201712 1 002	-
11	Pelayanan Satu Pintu (PTSP)	Dwi Bintang Satrio, S.H., M.H NIP. 19940916 201712 1 004	-

KETUA PENGADILAN NEGERI BATURAJA
KELAS I B

